

**TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
TERHADAP TERDAKWA DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

GUNTUR HADI PRAYOGA

NIM : 145010101111094



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
TERHADAP TERDAKWA DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**

Identitas Penulis :

a. Nama : Guntur Hadi Prayoga

b. NIM : 145010101111094

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka Waktu Penelitian : 5 Bulan

Disetujui Pada Tanggal : 25 Juni 2018

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.
NIP. 198408162015042002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
NIP. 196607101992032003

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

Oleh :
Guntur Hadi Prayoga
145010101111094

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.
NIP. 196111161986011001

Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.
NIP. 198408162015042002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Yuliati, S.H., LL.M.
NIP. 196607101992032003

Dr. Rachmad Safa'at, SH, M.Si
NIP. 196208051988021001

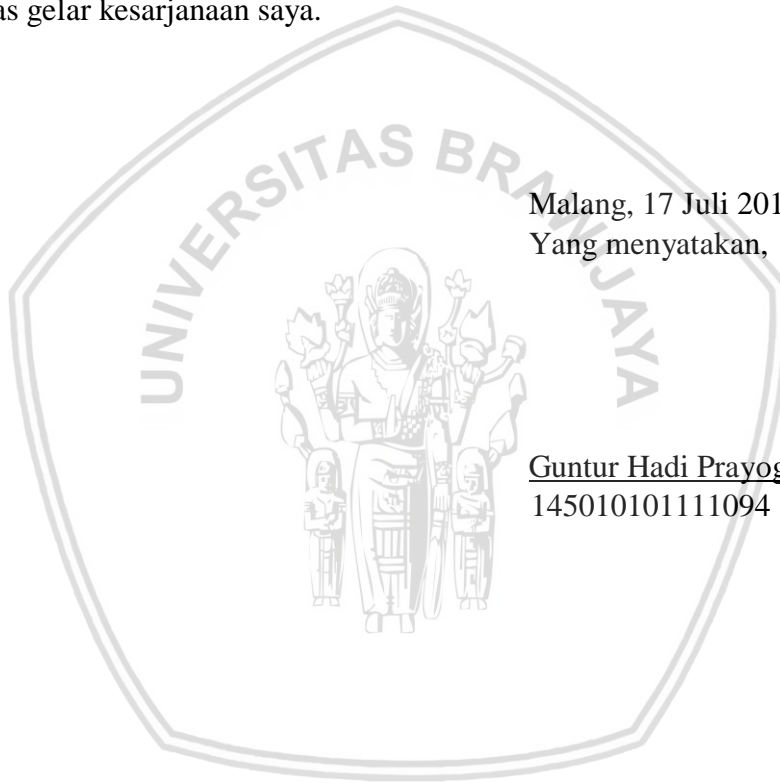
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 17 Juli 2018
Yang menyatakan,

Guntur Hadi Prayoga
145010101111094



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan Rahmat, Inayah, Taufik dan Hinayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**. Karya tulis ini merupakan skripsi yang diajukan kepada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kota Malang sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Selama penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan oleh berbagai pihak yang akan penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Dr. Yuliati, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
3. Bapak Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., selaku Dosen Pembimbing Utama untuk setiap kritik, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua untuk setiap kritik, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua Orang Tua saya yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan motivasi kepada saya.

6. Keluarga besar saya yang senantiasa memberikan semangat, doa, dan motivasi kepada saya.
7. Adik tercinta saya, yakni Alfian Wahyutama yang selalu memberikan doa, saran, dan semangat dari awal hingga akhir.
8. Teman-teman saya, yakni kawan-kawan komunitas NIC'S Malang, kawan-kawan parkir, Adelova, uwais, Caesar, pedang, qodri, fikri, badron, jemblung, marco. Terima kasih selalu menemani, membantu dan memberikan semangat kepada saya.
9. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja.

Malang, 17 Juli 2018

Guntur Hadi Prayoga

RINGKASAN

Guntur Hadi Prayoga, Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Juni 2018, **“TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA”**. Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., Mufatikhatul Farikhah, S.H., M.H.,

Dalam penulisan skripsi yang penulis bahas adalah Kewajiban Pemberian bantuan hukum oleh aparat penegak hukum melalui penunjukan advokat atau penasihat hukum adalah sebuah kewajiban yang telah diatur didalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan juga ketentuan yang berkaitan dengan bantuan hukum itu sendiri, yang tentunya menjadi sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses mulai dari penyidikan hingga ke persidangan. Penulis juga membahas tentang Apakah Makna Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum yang termuat dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan Apakah akibat hukum yang terjadi jika hak-hak terdakwa/tersangka atas bantuan hukum tidak dipenuhi

Permasalahan tersebut penulis kaji dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara membaca perundang-undangan, pendekatan konsep dan putusan-putusan hakim dengan teknik pengumpulan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal yang terkait dengan pokok bahasan yang Penulis teliti.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kata “wajib” dalam rumusan Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab negara untuk keadilan atas sebuah hak yang melekat pada warga negaranya, pasal 56 ayat (1) KUHAP berlaku apabila tersangka berada dalam kondisi, *Pertama*, jika sangkaan atau dakwaan diancam dengan pidana hukuman mati, hukuman 15 tahun atau lebih. *Kedua*, tersangka atau terdakwa “tidak mampu” menyediakan sendiri penasihat hukumnya, dan ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan 5 tahun atau lebih, sehingga penulis berpendapat, jika mengabaikan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini mengakibatkan hasil pemeriksaan dari tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

SUMMARY

Guntur Hadi Prayoga, Criminal Law, Faculty of Law, Brawijaya University of Malang, June 2018, **JUDICIAL REVIEW THE OBLIGATION OF ASSISTANCE THE LAW AGAINST THE DEFENDANTS IN ENTRUSTING THE CRIMINAL**" Dr. Prija Djatmika, S.H ., M.S., Mufatikhatul Farikhah, S.H ., M.H.,

In writing thesis that the author discussed is the Obligation of Provision of legal aid by law enforcement officers through the appointment of an advocate or legal counsel is an obligation that has been regulated in Article 56 paragraph (1) KUHAP and also provisions relating to the legal aid itself, which must be very important in protecting and defending the rights of perpetrators of criminal acts in the process from investigation to trial. The author also discusses about What is the Meaning of Legal Assistance Obligations contained in Article 56 paragraph (1) Criminal Procedure Code and whether the legal consequences that occur if the rights of defendants / suspects for legal aid are not fulfilled.

The problem is the authors review by using the method of normative juridical research, using the normative legal approach. The primary data collection technique is done by reading the rules, the concept approach, and the secondary data collection technique obtained through the book, which is related to the subject matter of the author thoroughly.

The result of the research can be concluded that the word "obligatory" in the formulation of Article 56 paragraph (1) of this Criminal Code Procedure is a form of state responsibility for justice for an inherent right of its citizen, article 56 paragraph (1) KUHAP applies if the suspect is in condition, First, if the allegation or indictment is threatened with the death penalty, a sentence of 15 years or more. Secondly, the suspect or defendant is "incapable" to provide his or her own legal counsel, and the threat of criminal penalty concerned or charged 5 years or more, so the authors argue that ignoring the provisions contained in Article 56 paragraph (1) of this Criminal Procedure shall result in the examination of the the public prosecutor is unacceptable.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	3
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	4
KATA PENGANTAR	5
RINGKASAN	7
SUMMARY	8
DAFTAR ISI.....	9
DAFTAR TABEL.....	12
DAFTAR LAMPIRAN.....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
I. Tinjauan Umum Bantuan Hukum ..	Error! Bookmark not defined.
a. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia	Error! Bookmark not defined.

- b. Pengertian Bantuan Hukum**Error! Bookmark not defined.**
- c. Dasar Hukum Bantuan Hukum**Error! Bookmark not defined.**
- d. Ruang Lingkup Bantuan Hukum ...**Error! Bookmark not defined.**
- e. Pengertian Penasihat Hukum**Error! Bookmark not defined.**
- f. Bantuan Hukum Cuma-Cuma.....**Error! Bookmark not defined.**
- II. Pengertian Tersangka dan Terdakwa**Error! Bookmark not defined.**
- III. Pengertian dan Pembagian *Miranda Principle***Error! Bookmark not defined.**
- IV. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana**Error! Bookmark not defined.**
 - i. Pengertian Sistem Peradilan Pidana**Error! Bookmark not defined.**
 - ii. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. **Error! Bookmark not defined.**

BAB III METODE PENELITIAN**Error! Bookmark not defined.**

- I. Jenis Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 1. Pendekatan Penelitian**Error! Bookmark not defined.**
 - 2. Jenis Bahan Hukum**Error! Bookmark not defined.**
 - 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**Error! Bookmark not defined.**
 - 4. Teknik Analisis Bahan Hukum**Error! Bookmark not defined.**
 - 5. Definisi Konseptual**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PEMBAHASAN.....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Makna Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum yang termuat dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)**Error! Bookmark not defined.**
- B. Akibat hukum yang terjadi jika hak-hak terdakwa atau tersangka atas bantuan hukum tidak dipenuhi.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP**Error! Bookmark not defined.**

- A. Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA.....**Error! Bookmark not defined.**

Buku**Error!**

Bookmark not defined.

Perundang-Undangan.....**Error! Bookmark not defined.**

Internet**Error! Bookmark not defined.**

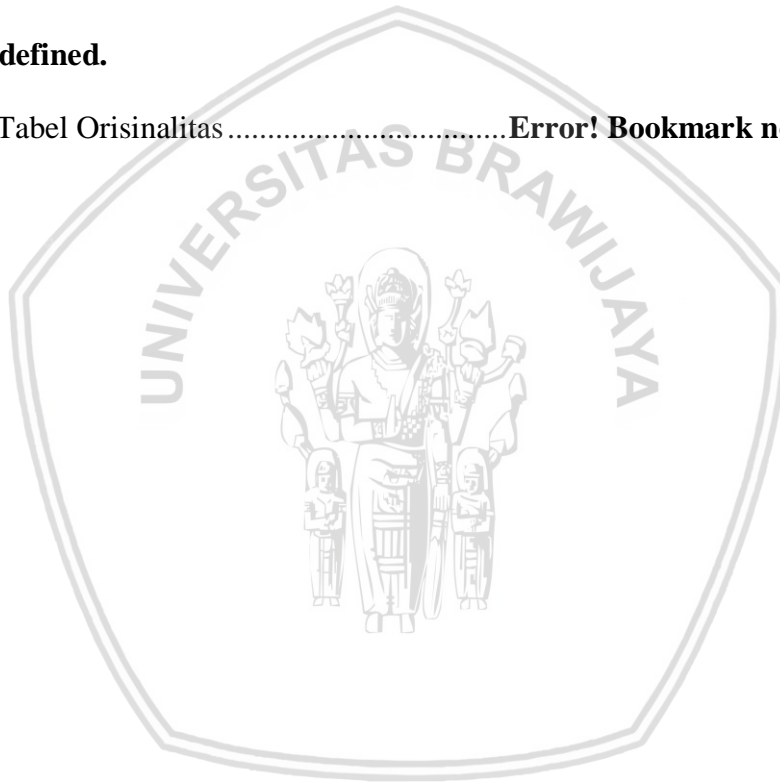
DAFTAR LAMPIRAN.....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kejahatan Tahun 2015-2017 Pengadilan Negeri Malang

dengan Ancaman Pidana Lima Tahun atau Lebih
Error! Bookmark not defined.

Tabel 1.2 Tabel Orisinalitas**Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR LAMPIRAN

1.	Surat Ketetapan Pembimbing.....	116
2.	Surat Deteksi Plagiasi.....	117
3.	Kartu Bimbingan.....	118



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat/The Rule of Law*). Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹

Asas dari negara hukum mengandung prinsip “equality before the law” (kedudukan yang sama dalam hukum) dan “*presumption of innocence*” atau sering disebut prinsip praduga tak bersalah.² Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis. Artinya, jika ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang, maka harus diimbangi pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang.

Adanya prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dan perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, merupakan petunjuk bahwa negara wajib memperhatikan masalah bantuan hukum bagi warganya. Penyelenggaraan

¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2007, hlm 97.

² Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 28.

bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negara.

Penyelenggaraan bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dengan aturan-aturan hukum yang dapat menjamin penegakan hukum. Aturan hukum yang menjamin penyelenggaraan bantuan hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah mengangkat dan menempatkan tersangka dan terdakwa dalam kedudukan yang sederajat sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan kemanusiaan yang utuh. Di samping itu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 56 sampai dengan Pasal 57 juga memberikan perlindungan terhadap setiap orang yang tersangkut perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum melalui advokat dan advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan serta pemerintah memberikan bantuan hukum tersebut secara cuma-cuma pada semua tingkatan peradilan sampai pada putusan perkara terhadap terdakwa atau tersangka .

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada perbedaan di hadapan hukum, baik tersangka, terdakwa dan aparat penegak hukum sama-sama warga negara yang sama kedudukannya dan kewajibannya di depan hukum yakni sama-sama mencari kebenaran dan keadilan. Siapapun yang melakukan pelanggaran hukum akan mendapat perlakuan yang sama tanpa perbedaan. Setiap orang wajib dianggap tidak bersalah (praduga tak bersalah) sampai kesalahannya dibuktikan dalam persidangan.

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh aparat penegak hukum sering kali tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk mendapatkan keterangan tersangka di tingkat penyidikan, mereka ditangkap saja dulu, kemudian pengakuannya didapatkan dengan cara intimidasi, kekerasan dan penyiksaan.

Akibat proses penyelesaian peristiwa pidana yang demikian banyak kasus hukum mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Tersangka, terutama yang miskin menderita akibat perlakuan tidak adil, disiksa, diinterogasi oleh para penegak hukum dan diadili oleh pengadilan yang kejam dan merendahkan martabatnya sebagai manusia, mereka ditahan tanpa proses yang adil, bahkan penyelesaian kasus yang ditangani tidak kunjung ada kejelasan. Hal demikian menimbulkan tingkat kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan mengalami kemerosotan, ini tercemar dari pola penyelesaian masalah yang dilakukan masyarakat yang cenderung main hakim sendiri. Penyelesaian masalah tersebut menjadi pilihan alternatif di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat peradilan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pandangan bahwa proses melalui mekanisme peradilan penuh dengan permainan ketidakadilan serta ketidakpastian yang bertameng kepastian hukum sehingga terjadi konflik dalam kehidupan masyarakat.

Pemberian bantuan hukum oleh advokat/penasehat hukum tentunya sangat penting dalam melindungi dan membela hak-hak pelaku tindak pidana dalam proses mulai dari penyidikan hingga ke persidangan. Hukum Acara Pidana

Indonesia memberikan peluang adanya bantuan hukum mulai dari penangkapan atau penahanan tersangka atau terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan.

Hal ini diperkuat lagi di dalam Pasal 54 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasal ini menentukan hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum apakah orang itu mampu maupun tidak mampu secara ekonomis. Bantuan hukum ini juga diharapkan dapat mencegah perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi atas tersangka atau terdakwa yang tergolong miskin atau yang biasa disebut *due process of law* atau proses hukum yang adil.³

Mengingat bahwa tidak setiap orang itu mampu secara ekonomi untuk menggunakan advokat/penasehat hukum dalam memperoleh bantuan hukum, maka Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan tentang mereka yang tidak mampu membayar penasehat hukum untuk mendampingi dalam hal mereka melakukan perbuatan pidana yang diancam dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³ Yudha Pandu, *Klien & Advokat Dalam Praktek*, PT. Abadi, Jakarta, 2004, hal. 43.

Dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat ketentuan mengenai kewajiban pendampingan penasehat hukum terhadap pelaku tindak pidana diancam hukuman diatas lima tahun. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman diatas lima tahun wajib didampingi penasehat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum tentunya pengadilan berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum guna mendampingi pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lengkapnya berbunyi :

"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka."

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat ketentuan mengenai kewajiban pendampingan penasehat hukum terhadap pelaku tindak pidana diancam hukuman diatas lima tahun. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut tentunya setiap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman diatas lima tahun wajib didampingi penasehat hukum. Apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar penasehat hukum tentunya pengadilan berkewajiban untuk menunjuk penasehat hukum guna mendampingi pelaku tindak pidana tersebut.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas memberikan jaminan secara konstitusional terhadap golongan lemah dan miskin yang paling rentan terhadap diskriminasi dan perlakuan tidak adil. Peraturan tersebut dinyatakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dengan demikian, setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Penyebutan hak dalam Undang-Undang Dasar 1945 membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengkualifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhannya. Karena disebutkan secara resmi dalam konstitusi, maka hak tersebut dikualifikasi sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah Negara.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan landasan bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik dan berwibawa serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat martabat tersangka, tertuduh atau terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks inilah berbicara tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses atau disebut sebagai *criminal justice system* yang dimulai dari proses penangkapan,

⁴ Chrisbiantoro, M Nur Sholikin, Satrio Wirataru, ***Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum***, Jakarta: KontraS, 2014, hlm.1

penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

KUHAP lebih menekankan dalam setiap proses peradilan pidana memperlihatkan ciri yang humanis. Dan merupakan cara baru yang dianut di Indonesia. dalam KUHAP, semua tersangka, terdakwa, mendapatkan perlakuan yang sama, berbeda halnya pada waktu Indonesia menganut sistem dalam *Het Herziene Reglement* (HIR).

Bersumber pada asas praduga tak bersalah maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapatkan hak-haknya. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka dalam kedudukan yang adil. Hukum mesti ditegakkan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka tidak boleh "ditelanjangi" hak tersangka yang melekat pada dirinya. Hak-hak Yuridis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) wajib diberikan kepada diri pribadi tersangka.⁵

Dari banyaknya hak-hak tersangka atau terdakwa inilah, menurut Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril dikemukakan bahwa hak-hak tersangka atau terdakwa adalah sebagai berikut:⁶

⁵ Asa, Mandiri, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Jakarta, 2007, Cetakan Pertama, hal. 10

⁶ Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Acara pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 25

1. Seorang tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantara penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak saudara dalam hal yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau kekeluargaan;
2. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak saudara;
3. Tersangka atau terdakwa berhak menerima kunjungan dari rohaniawan;
4. Tersangka atau terdakwa berhak diadili dalam persidangan yang terbuka untuk umum;
5. Tersangka atau terdakwa berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya;
6. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian;
7. Tersangka atau terdakwa berhak mengajukan banding atau kasasi kecuali putusan bebas;
8. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas kesalahan pemeriksaan pidana.

Dari hak-hak tersangka di atas khususnya nomor 2 (dua), tersangka atau terdakwa berhak meminta bantuan hukum sebagai pembelanya. Dalam hal ini, pemberian bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subjek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum.

Bantuan hukum menjadi sangat penting ketika tersangka dalam proses pemeriksaan menghadapi para aparat hukum. Oleh karena itu seorang tersangka atau terdakwa perlu pendampingan hukum agar kedudukannya menjadi seimbang. Apabila kedudukan antara tersangka atau terdakwa dan penegak hukum tidak seimbang, maka akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam proses hukum tersebut. Dalam memenuhi hak dan kewajiban tersebut maka tersangka atau terdakwa harus memperoleh bantuan hukum secukupnya.

Aturan normatif sebagaimana diatur dalam pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut tentunya sebagai manifestasi dari tujuan Negara dalam melindungi warganya dan sekaligus ini menjadi suatu idealisme dan ideologi dari praktik bernegara yang menjunjung tinggi hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia) dengan tidak mengabaikan hak bagi masyarakat rendah, rentan dan kurang mampu.

Namun demikian, adanya suatu idealisme dan ideologi yang tinggi pada tataran praktiknya dalam tingkatan penyidikan sampai kepada persidangan, ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum (KUHAP) tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik atau pejabat yang berwenang atas Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain dapat melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) tersangka juga dapat menghambat usaha mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu demi terwujudnya keadilan yang merata. Artinya bahwa sesungguhnya sudah menjadi tugas dan kewajiban dari Negara untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum terhadap warga Negara yang

tidak mampu dengan memberikan penasehat hukum/advokat ketika beracara di Pengadilan secara cuma-cuma.

Berdasarkan data yang ada di Pengadilan Negeri Kota Malang terdapat banyak kasus yang terdakwa diancam pidana 5 tahun atau lebih sehingga perlu adanya bantuan hukum sebagai salah satu hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi dan dibela. Dibawah ini merupakan beberapa kasus tindak pidana umum yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Malang pada tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Kejahatan Tahun 2015-2017 Pengadilan Negeri Malang dengan Ancaman Pidana Lima Tahun atau Lebih

No.	Kasus	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
		Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus
1	Pencurian	165	131	82
2	Narkotika	203	211	246
3	Psikotropika/kesehatan	47	36	29
4	Pembunuhan	3	0	1
5	Penganiayaan berat	16	2	1
Jumlah		434	380	359

(Sumber: Data Pengadilan Negeri Malang diambil pada tanggal 22 November 2017)

Dari Tabel 1 diatas diambil 2 (dua) contoh uraian kasus terdakwa yang dipidana 5 tahun atau lebih yang tidak mampu tanpa didampingi penasihat hukum:

1. Terdakwa dengan nama Rosida Dewi dengan putusan nomor 4/Pid.Sus.Anak/2017/PN Malang terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan Bencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Dakwaan dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Terdakwa dengan nama Iwan Rudianto dengan putusan nomor 278/Pid.B/2016/PN Malang terbukti melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan dengan pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dari 2 (dua) contoh diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak mampu (miskin) ataupun mampu yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Malang tidak mendapatkan bantuan hukum sehingga tidak didampingi oleh penasihat hukum, sebagaimana yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mampu berhak mendapatkan penasihat hukumnya sendiri yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam setiap tingkatan dalam hal ini yaitu Pengadilan Negeri Malang. Penerapan pasal ini belum optimal karena masih adanya terdakwa yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapat bantuan hukum seperti contoh diatas.

Menurut aturan hukum yang berlaku, untuk memperoleh keadilan hukum yang sebenarnya pada setiap tingkat pemeriksaan, terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas karena terdakwa tidak boleh adanya unsur paksaan atau ditekan. Oleh karena itu, perlu adanya bantuan hukum dengan menunjuk penasihat hukum atau pembela bagi terdakwa untuk menekan resiko terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan proses hukum dari pejabat yang berwenang serta perlu adanya pendampingan penasihat hukum dalam setiap proses peradilan

agar tersangka atau terdakwa tidak serta-merta buta akan proses hukum yang dijalaninya sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Terdapat penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Tabel Orisinalitas

NO	Nama Peneliti dan Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	Artha Yudha Kurniawan (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Implementasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Terkait Dengan Pemenuhan Hak Tersangka Untuk Mendapat Bantuan Hukum Dalam Penyidikan (Studi di Kepolisian Sektor Tambaksari)	1. Bagaimana Implementasi pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam praktek penyidikan? 2. Apa kendala yang dihadapi penyidik dalam menerapkan pasal 56 ayat (1) KUHAP? 3. Bagaimana upaya penyidik dalam menerapkan pasal 1 KUHAP?	Skripsi Artha Yudha memfokuskan terhadap Pelaksanaan, dan kendala serta upaya dalam penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP di Kepolisian sector Tambaksari, sedangkan Skripsi yang penulis angkat tentang makna kewajiban pasal 56 ayat (1) KUHAP dan akibat hukum jika tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
2.	Fines Fatimah (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Studi tentang Hak – Hak Tersangka Pada Tahap Penyidikan : Suatu Perbandingan Hukum Antara Pasal 56 Ayat (1) KUHAP dengan Miranda Rule dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat	1. Bagaimanakah perbandingan antara Pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan Miranda Rule dalam Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat yang ditinjau dari aspek filosofis, politik hukum, dan yuridis? 2. Apakah perlu Indonesia melegalisasi/mengatur	Skripsi Fines Fatimah memfokuskan terhadap perbandingan pasal 56 ayat (1) KUHAP dengan kasus Miranda Rule dalam sistem peradilan pidana di Amerika, serta perlu tidaknya Indonesia melegalisasi <i>right to remain silent</i> kedalam KUHAP. Sedangkan Skripsi yang penulis angkat tentang makna

			<i>right to remain silent</i> ke dalam KUHAP?	kewajiban pasal 56 ayat (1) KUHAP dan akibat hukum jika tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
3	Rahman Ryan (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) (2017)	Penerapan pasal 56 ayat (1) kuhap terhadap terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih dalam proses peradilan pidana	1. Bagaimanakah penerapan pasal 56 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Malang? 2. Apa saja kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Malang dalam menerapkan pasal 56 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih?	Skripsi Rahman Ryan memfokuskan terhadap Penerapan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dan juga apa saja hambatan-hambatan dalam penerapan pasal 56 ayat (1) KUHAP di Pengadilan Negeri Kota Malang. sedangkan Skripsi yang penulis angkat tentang makna kewajiban pasal 56 ayat (1) KUHAP dan akibat hukum jika tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.
4	Guntur Hadi Prayoga (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) 2018	Tinjauan Yuridis Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana	1. Apakah Makna Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum yang termuat dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ? 2. Apakah akibat hukum yang terjadi jika hak-hak terdakwa / tersangka atas bantuan hukum tidak dipenuhi ?	Skripsi ini memfokuskan terhadap Makna dari Kewajiban pemberian bantuan hukum serta mengetahui akibat hukum yang terjadi jika hak terdakwa/tersangka atas bantuan hukum tidak dipenuhi dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang “ **TINJAUAN YURIDIS KEWAJIBAN PEMBERIAN**

BANTUAN HUKUM TERHADAP TERDAKWA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA. “

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Makna Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum yang termuat dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ?
2. Apakah akibat hukum yang terjadi jika hak-hak terdakwa/tersangka atas bantuan hukum tidak dipenuhi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui realisasi Yuridis Normatif terhadap pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang makna dari kewajiban pemberian bantuan hukum terhadap Terdakwa / Tersangka dalam penyelesaian perkara pidana.
2. Mengetahui akibat hukum khususnya terhadap penyidik dan pejabat yang berwenang akibat tidak dijalkannya pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tentang kewajiban penegak hukum dalam memberikan bantuan penasihat hukum bagi terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih dalam proses peradilan pidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang kewajiban penegak hukum memberikan bantuan hukum bagi terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai hak-hak atas terdakwa khususnya terdapat pada pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang pemberian bantuan hukum
 - b. Sebagai bentuk penambahan wawasan terutama jawaban atas permasalahan yang terjadi dalam penerapan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih.
 - c. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk perkembangan informasi dan pengetahuan ilmu dalam bidang hukum.
2. Manfaat Praktis
- a. Pemerintah khususnya penegak atau pejabat hukum yang bersangkutan dapat mengevaluasi kinerja dalam melindungi hak - hak atas tersangka atau terdakwa dalam proses perkara pidana
 - b. Memberi pengetahuan yang membuat masyarakat lebih mengerti, mengenai pentingnya hak-hak atas tersangka atau terdakwa khususnya dalam penerimaan bantuan hukum demi terciptanya rasa keadilan yang baik dimata hukum

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang yang berisi tentang alasan yang mendasari dilakukan penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dengan rumusan masalah terkait Apakah Makna Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum yang termuat dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Apakah akibat hukum yang terjadi jika hak-hak terdakwa/tersangka atas bantuan hukum tidak dipenuhi

BAB II Kajian Pustaka: Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum tentang tinjauan umum bantuan hukum, pengertian tersangka atau terdakwa, pengertian dan pembagian *Miranda principle*, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana.

BAB III Metode Penelitian: Menguraikan secara jelas tentang metode penelitian yang dilakukan meliputi metode pendekatan yuridis normatif, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

BAB IV Hasil dan Pembahasan: Membahas tentang Makna Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum yang termuat dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Apakah akibat hukum yang

terjadi jika hak-hak terdakwa/tersangka atas bantuan hukum tidak dipenuhi tersebut.

BAB V Penutup: Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta rekomendasi yang diberikan dari permasalahan yang diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan Umum Bantuan Hukum

a. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Konsep bantuan hukum telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Sebenarnya bantuan hukum telah dilaksanakan pada masyarakat Eropa sejak zaman Romawi. Pada saat itu, bantuan hukum berada dalam bidang moral dan dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang tanpa mengharapkan dan menerima imbalan. Setelah Revolusi Prancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum dengan lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20 (Dua Puluh), bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.¹

Di Indonesia, bantuan hukum sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa pra-kolonial, Belanda tidak memberlakukan hukum yang baru, tetapi menerapkan kebijaksanaan politik baru. Sejak permulaan, pihak (VOC) berketetapan menghormati hukum lokal, cara lain untuk mengatakan bahwa, pada umumnya mereka tidak dapat mengesampingkan,

¹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 11.

kecuali bila kepentingan dagang jadi taruhan. Hal yang tidak mereka hormati adalah hubungan-hubungan ekonomi dan politik yang selamanya merupakan sumber ekonomi lokal. Pada tahun 1900- an, selama kurun kebijaksanaan politik etis, pembaruan hukum siap dilaksanakan. Namun, ditilik dari sudut pandang masyarakat Indonesia, sebagian besar perubahan ini hanyalah penghalusan pola yang sudah terbentuk sebelumnya. Pada tahun 1848, terjadi perubahan besar dalam sejarah hukum negeri Belanda. Berdasarkan atas asas konkordansi, dengan Firman Raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia. Peraturan tersebut antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*Reglement of de Regterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*), yang biasa disingkat dengan R.O. Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut.²

Berdasarkan Pasal 163 ayat (1) *Indische Staatsregeling* (IS), penduduk Indonesia dibagi atas 3 golongan yaitu:

a. Golongan Eropa

Pendefinisian golongan Eropa di depan hukum positif Hindia Belanda disusun pada ayat 2. Berdasarkan ayat ini, orang-orang Eropa, dihadapan hukum, adalah semua orang Belanda, semua

² Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu hakasasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, 2000,.hlm. 2.

orang non-Belanda yang berasal dari Eropa, semua orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.

b. Golongan Bumi Putera

Pendefinisian golongan Indonesia ditemukan pada ayat 3. Definisi golongan Indonesia dari ayat ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi) atau golongan lain yang meleburkan diri. Golongan lain yang meleburkan diri adalah orang-orang bukan Indonesia asli, namun menjalani kehidupan meniru kehidupan orang pribumi dengan meninggalkan hukum asalnya. Wanita golongan lain yang menikah dengan orang Indonesia asli juga termasuk dalam golongan Indonesia asli.

c. Golongan Timur Asing

Perumusan golongan Timur Asing dilakukan secara negatif. Diatur dalam ayat 4, orang-orang yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Indonesia. Ayat ini dibuat secara negatif untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terlewat dari penggolongan.³

Penggolongan terhadap masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda berdampak pada adanya perbedaan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam segi kehidupan ekonomi, sosial dan politik. Dalam berbagai

³ Pasal 163 Indische Staatsregeling HIR

segi kehidupan tersebut, golongan Indonesia atau yang sering disebut dengan golongan Bumiputera (pribumi) menempati strata terbawah.

Perbedaan itu berimplikasi pada sistem peradilan di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Hindia Belanda, dikenal adanya 2 sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang Eropa dan yang dipersamakan yang jenjang peradilannya terdiri atas *Residentiegerecht* untuk tingkat pertama, *Raad van Justitie* untuk tingkat banding, dan Mahkamah Agung (*Hogerechtshof*). Kedua, hierarki peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan, yang meliputi: *Districtgerecht*, *Regentschapsgerecht*, dan *Landraad*. Demikian pula dengan hukum acara yang mengatur masing-masing sistem peradilan tersebut berbeda untuk acara pidana maupun acara perdata. Untuk Peradilan Eropa berlaku *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) untuk acara perdatanya dan *Reglement op de Strafvoordering* (Sv) untuk acara pidananya. Sedangkan bagi Peradilan Indonesia berlaku *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), baik untuk acara perdata maupun acara pidananya.

Apabila diperbandingkan, maka HIR memuat ketentuan perlindungan terhadap kekuasaan pemerintah yang jauh lebih sedikit daripada kitab undang-undang untuk orang Eropa. Sebagai contoh, bagi orang-orang Eropa dikenal kewajiban *legal representation by a lawyer* (*verplichte procureur stelling*), baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Tampaknya hal ini lebih didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka telah mengenal lembaga yang bersangkutan di dalam kultur

hukum mereka di negeri Belanda. Sedangkan tidak demikian halnya yang diatur untuk golongan Bumiputera. Pemerintah kolonial tidak menjamin hak fakir miskin Bumiputera untuk dibela advokat dan mendapatkan bantuan hukum.⁴

Selama era reformasi, banyak usaha yang telah dilakukan untuk membentuk suatu undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum. Namun kebanyakan ketentuan tentang bantuan hukum diatur dalam suatu undang-undang yang tidak secara khusus mengatur mengenai bantuan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Untuk merealisasikan kegiatan bantuan hukum selama belum adanya undang-undang yang secara tegas mengatur mengenai bantuan hukum, dikeluarkanlah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, selanjutnya disebut SEMA, yang pada dasarnya melaksanakan amanat Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan SEMA ini memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan TUN di Indonesia untuk segera membentuk Pos Bantuan Hukum, selanjutnya disebut Posbakum, guna

⁴ Frans Hendra Winarta, *Op.cit.*, hlm.21.

memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis.⁵

Landasan hukum tentang bantuan hukum di Indonesia diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum pada tanggal 2 November 2011 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum ini memberikan tatanan prosedural yang tegas dan pasti mengenai pemberian bantuan hukum sehingga hak-hak masyarakat miskin lebih terlindungi dan terjamin guna memperoleh keadilan di depan hukum (*equity before the law*).

b. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan pelayanan hukum yang bersifat Cuma-Cuma. Semua warga masyarakat atau warga Negara memiliki aksesibilitas yang sama dalam memperoleh pelayanan hukum.⁶ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pelaksanaan pemberian bantuan hukum hanya mengatur mengenai kondisi untuk menerima bantuan hukum, tidak memaparkan secara jelas apa yang dimaksud bantuan hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, dibangun suatu konsep bantuan hukum. Pada dasarnya baik di Eropa maupun di Amerika, terdapat dua model sistem bantuan hukum yakni:

⁵ Lampiran 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

⁶ Ari Yusuf Amir, *Pendidikan Keadvokatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, hlm 13.

a. *A Juridicial Right* (model yuridis-individual)

Model ini menekankan pada sifat individualistis maksudnya adalah setiap orang akan selalu mendapat hak untuk memperoleh bantuan hukum, tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya, mereka menemui pengacara, dan pengacara akan memperoleh imbalan jasa-jasa yang diberikannya kepada negara. Jadi bilamana seseorang tidak mampu, maka seseorang itu akan mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma.

b. *A Welfare Right* (model kesejahteraan)

Sistem hukum di Amerika Serikat ini berada dibawah pengaturan *criminal justice act* dan *economic opportunity act*. Kedua peraturan itu mengarahkan bantuan hukum sebagai alat untuk mendapatkan keadilan bagi seluruh rakyat terutama bagi mereka yang tidak mampu. Pada model ini dituntut campur tangan yang intensif dari negara atau pemerintah. Bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk memenuhi hak-hak mereka sebagai warga Negara.⁷ Bila melihat kedua model tersebut, maka dapat diambil kesimpulan dimana disatu pihak bantuan hukum dapat dilihat sebagai suatu hak yang diberikan pada warga masyarakat untuk melindungi kepentingan-kepentingan individual dan di lain pihak sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan suatu negara kesejahteraan. Adapun pengertian bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah berbeda,⁸ yaitu:

⁷ Soerjono Soekanto, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 11.

⁸ M Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 334.

c. *Legal aid*

Bantuan hukum sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kekurangan keuangannya dan tidak mampu membayar penasihat hukum pribadi. Jadi, *legal aid* berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara dimana dalam hal ini:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
- b. Bantuan ini lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin

tujuan dari bantuan hukum *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan tidak mengerti hukum hukum.

d. *Legal assistance*

Legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasihat hukum sebagai ahli hukum. Sehingga dalam pengertian itu, sebagai ahli hukum ia dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian dari seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tidak terbatas pada kondisi seseorang yang miskin melainkan kepada siapa saja tanpa terkecuali.

e. *Legal service*

Clarence J. Diaz memperkenalkan istilah ini "*Legal service*" memiliki makna lebih luas yakni pelayanan hukum sebagai bentuk jasa oleh kaum profesi hukum kepada khalayak didalam masyarakat dengan maksud

menjamin agar tidak seorangpun didalam masyarakat terampas hak haknya untuk memperoleh nasehat-nasehat hukum.⁹

Istilah *legal service* sendiri memiliki makna dan tujuan, yaitu :

- a. Memberi bantuan kepada anggota masyarakat yang operasionalnya bertujuan menghapuskan kenyataan-kenyataan diskriminatif dalam penegakan dan pemberian jasa bantuan antara rakyat miskin yang berpenghasilan kecil dengan masyarakat kaya yang berpenghasilan besar.
- b. Dengan pelayanan hukum yang diberikan kepada anggota masyarakat yang memerlukan, dapat diwujudkan kebenaran hukum itu sendiri oleh aparat penegak hukum dengan jalan menghormati setiap hak yang dibenarkan hukum bagi setiap anggota masyarakat yang membedakan kaya dan miskin.
- c. Disamping untuk menegakkan hukum dan penghormatan kepada yang diberikan hukum kepada setiap orang. *Legal service* lebih cenderung menyelesaikan persengketaan dengan menempuh jalan damai.

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.¹⁰ Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.¹¹

⁹ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Binacipta, Bandung, 1994, hlm 9

¹⁰ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.cit.* hlm.7

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Op.cit.*, hlm.vii.

Bedasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu”. Pengertian bantuan hukum juga dapat dilihat dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan Pencari keadilan bagi yang tidak mampu.”

Pengertian bantuan hukum yang agak luas juga pernah disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yakni sebagai berikut : “Pendidikan klinis sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata untuk akhirnya tampil di muka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti jurusan hukum tata negara, hukum administrasi pemerintahan, hukum internasional dan lain-lain, yang memungkinkan pemberian bantuan hukum di luar pengadilan misalnya, dalam soal-soal perumahan di Kantor Urusan Perumahan (KUP),

bantuan di Imigrasi atau Departemen Kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut urusan internasional di Departemen Luar Negeri, bahkan memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan lain sebagainya.¹²

Sedangkan pengertian bantuan hukum yang lebih sempit juga pernah disampaikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia yang menyatakan bahwa, bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seseorang terdakwa dari seorang penasehat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan.¹³

c. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Negara Indonesia telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum. Jaminan tersebut ada dalam konstitusi, Undang-Undang, serta peraturan pelaksanaannya. Dasar hukum tentang bantuan hukum adalah sebagai berikut :

1. Pancasila

Pancasila adalah dasar dari segala sumber hukum tertinggi di Indonesia. Setiap ketentuan atau peraturan yang berlaku harus sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Sila kedua yang menyatakan “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” merupakan bukti bahwa hubungan antar sesama manusia harus didasarkan pada rasa

¹² Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Op.cit.* hlm.9.

¹³ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Loc.cit.*

kemanusiaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Dengan berpegangan pada sila kedua Pancasila, bantuan hukum dan pancasila memiliki persamaan dimana setiap manusia harus diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi antara golongan kaya maupun miskin, perbedaan agama, ras, suku bangsa atau gender. Begitu juga dihadapan hukum, setiap manusia harus diperlakukan sama di depan hukum, yakni berhak untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh bantuan hukum.

2. Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa,

“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Kemudian, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal tersebut dengan jelas berhubungan dengan bantuan hukum, dimana setiap warga negara berhak memperoleh persamaan kedudukan dalam bidang hukum, yaitu kesempatan untuk mendapatkan bantuan hukum baik didalam maupun diluar persidangan.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ini menjadi salah satu bentuk pelaksanaan hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memberikan bantuan hukum bagi orang miskin.

4. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil - *International Covenant on Civil and Political Right*).

Pasal 16 dan Pasal 26 Konvensi itu menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equity before the law*) dimana semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.

5. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Penjelasan tentang bantuan hukum bagi orang miskin terdapat dalam BAB IV Tentang Bantuan Hukum cuma-cuma seperti yang tercantum dalam Pasal 22 Ayat (1) dan (2). Hubungan pasal tersebut dnegan bantuan hukum adalah bahwa seorang advokat wajib membeikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari

keadilan yang tidak mampu, dan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

6. Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Dasar hukum tentang bantuan hukum dimuat dalam BAB XI Tentang Bantuan Hukum pada Pasal 56 dan Pasal 57. Pasal 56 Ayat (1) dan (2) mempunyai hubungan dengan bantuan hukum dimana setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, dan negara yang menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Sedangkan pada Pasal 57 Ayat (1), (2) dan (3) hubungannya dengan bantuan hukum adalah setiap pengadilan negeri harus membentuk pos bantuan hukum agar pencari keadilan yang tidak mampu dapat memperoleh bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai pada putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang ini memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh oleh tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung. Pemberian hak-hak ini juga diikuti dengan pengaturan mengenai kewajiban tertentu

kepada aparat penegak hukum agar hak-hak tersebut dapat terealisasi dalam praktek peradilan pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang tata cara mendapatkan penasehat hukum, yaitu pada Pasal 56 ayat (1) dan (2).

8. Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia

Penjelasan tentang bantuan hukum bagi orang miskin terdapat dalam Pasal 18. Pasal 18 menyatakan bahwa seseorang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

9. PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Dasar hukum tentang bantuan hukum bagi orang miskin terdapat pada Pasal 2, 3, 5, 10, dan 12. Dalam Pasal 2, dinyatakan bahwa advokat diharuskan untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada semua lapisan masyarakat pencari keadilan dengan tidak memandang dari pangkat, jabatan maupun golongan, ataupun status sosial lainnya yang ada dalam masyarakat. Pasal 3 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa bantuan hukum yang diberikan cuma-cuma berlaku disetiap tingkatan proses peradilan, baik di dalam maupun diluar persidangan. Pasal 5 menyatakan bahwa permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma boleh diajukan secara bersama-sama oleh para pencari keadilan apabila terdapat kepentingan yang sama dalam suatu persoalan hukum.

Pasal 10 menyebutkan bahwa advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran atau honorarium. Dan pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma dan apabila terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum.

10. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum. Penjelasan mengenai bantuan hukum terdapat dalam Pasal 1 angka (1), (2) dan (3). Pada Pasal 1 angka 1, penyelenggara dan penggunaan anggaran bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara, baik Pidana maupun Perdata dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa pemohon bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu dan memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa pos bantuan hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum untuk kelengkapan administrasi.

d. Ruang Lingkup Bantuan Hukum

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum yang dimaksud meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.

Bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum jika penerima bantuan hukum tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 yang dimaksud dengan hak dasar secara layak dan mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas pangan
- b. Hak atas sandang
- c. Hak atas layanan kesehatan
- d. Hak atas layanan pendidikan
- e. Hak atas pekerjaan dan usaha
- f. Hak atas tempat tinggal atau rumah

e. Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Bantuan hukum diselenggarakan dalam rangka untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dalam hal ini yaitu Penasihat Hukum. Menurut

pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011, menteri mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b. Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
- c. Menyusun rencana Anggaran Bantuan Hukum;
- d. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka penerapan pasal 56 ayat (1) KUHAP terhadap terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih dalam proses peradilan pidana dikaitkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 dapat dilaksanakan atas dasar pertimbangan berikut ini:

- a. Penerima bantuan hukum dalam hal ini terdakwa merupakan golongan miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- b. Bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum.
- c. Adanya anggaran bantuan hukum yang disusun oleh menteri dan dilaporkan kepada DPR setiap akhir tahun anggaran.

e. Pengertian Penasihat Hukum

Pengertian penasihat hukum atau biasa disebut Advokat menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan pengertian penasihat hukum menurut Pasal 1 butir 13 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Kemudian menurut Frans Hendra Winarta, dalam pekerjaan *legal counseling* (konsultan hukum) sudah termasuk didalamnya mendampingi, membantu, dan menyatakan salah atau tidak bersalah seseorang di Pengadilan maupun sidang umum lainnya.¹⁴

Sumpah atau Janji Advokat Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Sumpah atau janji advokat adalah sebagai berikut:

- a. Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji :
 - 1. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

¹⁴Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 3.

2. bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
3. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
4. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
5. bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
6. bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.”

Dalam sumpah poin ke 6 (enam) disebutkan bahwa advokat wajib melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum didalam suatu perkara sesuai tanggung jawab profesinya yang berarti bahwa penasihat hukum (advokat) dilarang menolak perkara yang dianggap wajar olehnya sesuai tanggung jawab sebagai advokat.

f. Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi:

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”

Yang berarti bahwa advokat wajib memberikan jasa bantuan hukumnya secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang miskin atau tidak mampu melalui persyaratan dan tata cara yang diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Berdasarkan hal ini maka penasihat hukum (advokat) mempunyai kewajiban dalam memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mampu atau miskin secara cuma-cuma dan penasihat hukum tidak dapat menolak jika terdakwa meminta bantuan hukum darinya dengan syarat kasus yang dihadapi wajar untuk ditangani oleh penasihat hukum sesuai dengan tanggung jawab profesinya.

g. Jenis-Jenis Bantuan Hukum

Pembagian jenis-jenis bantuan hukum sangat berguna untuk dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian terhadap hubungan antarberbagai faktor sosial untuk menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan tatacara pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi pihak-pihak yang berhak menerima bantuan hukum, khususnya orang miskin.

Schyut, Groenendijk dan Sloot membagi bantuan hukum menjadi lima jenis, yaitu:

1) Bantuan Hukum Preventif (*Preventif Rechthulp*)

Yaitu bantuan hukum yang bertujuan memberikan penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat;

2) Bantuan Hukum Diagnostik (*Diagnostic Rechthulp*)

Yaitu bantuan hukum yang bertujuan untuk memberikan bimbingan dan nasehat yang biasanya disebut dengan konsultan hukum;

3) Bantuan Hukum Pengendalian Konflik (*Konflik Reguleren De Rechthulp*)

Yaitu bantuan hukum untuk menyelesaikan masalah hukum konkret secara aktif baik di luar maupun di muka persidangan, jenis bantuan hukum ini biasanya diberikan khusus bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin;

4) Bantuan Hukum Pembentukan Hukum (*Rechtsvormende Rechthulp*)

Adalah bantuan hukum yang mencakup usaha-usaha pemberian masukan atau saran yang bertujuan menghasilkan yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar

5) Bantuan Hukum Pembaharuan Hukum (*Rechtsvernieuwend Rechthulp*)

Yaitu bantuan hukum yang meliputi usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui hakim atau pembentuk undang-undang

Jenis-jenis bantuan hukum yang terdapat di Indonesia adalah :

1. Bantuan hukum konvensional, merupakan tanggung jawab moral profesional advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal atau legal, dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan serta pembelaan di pengadilan;
2. Bantuan hukum konstitusional, adalah bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Bersifat aktif, tidak terbatas pada individu dan tidak terbatas pada format legal;
3. Bantuan hukum struktural, dalam hal ini, bantuan hukum bukan merupakan sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk miskin, tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, setabudaya yang sarat akan penindasan. Masyarakat miskin yang paham tentang pengetahuan dan pemahaman kepentingan-kepentingan bersama mereka dan adanya pengertian bersama di kalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka yang perlu dilindungi oleh hukum, adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin

tentang hak-hak mereka yang telah diakui hukum, dan adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan

masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan kepentingan mereka dalam masyarakat.¹⁵

II. Pengertian Tersangka dan Terdakwa

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan perbedaan antara apa yang dimaksud dengan Tersangka atau Terdakwa. Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril bahwa dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa tersangka masih pada tingkat pemeriksaan penyidik (polisi), sedangkan terdakwa sudah pada tingkat jaksa (penuntut umum) dan pemeriksaan pengadilan.¹⁶

¹⁵ <http://www.tanyahukum.com/uncategorized/179/jenis-bantuan-hukum-di-indonesia/>

Diakses pada 23 november 2017 pukul 21.25 WIB

¹⁶ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril,. *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktek*. Ghalia Indonesia. Jakarta,2004. hlm 17

Sedangkan Andi Hamzah, menyatakan bahwa *Wetboek van Strafvordering* Belanda tidak membedakan istilah tersangka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte*, tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*).¹⁷ Namun, demikian, dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Sedangkan pengertian *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa seperti tersebut pada butir 15 di muka.

Sama dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah Inggris dibedakan pengertian *teh suspect* (sebelum penuntutan) dan *the accused* (sesudah penuntutan). Dengan penjelasan di atas, baik tersangka maupun terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana sesuai dengan bukti dan keadaan yang nyata atau fakta. Oleh karena itu orang tersebut :

- a. Harus diselidiki, disidik dan diperiksa oleh penyidik.
- b. Harus dituntut dan diperiksa dimuka sidang pengadilan oleh penuntut umum dan hakim.

¹⁷ Andi Hamzah . *Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi*. Sinar Grafika.Jakarta, 2004 hlm 62.

- b. Jika perlu terhadap tersangka atau terdakwa dapat dilakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan benda sesuai dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang.¹⁸

III. Pengertian dan Pembagian *Miranda Principle*

Dalam praktiknya dibagi menjadi tiga bagian sebagaimana dikemukakan Sofyan Lubis sebagai berikut:¹⁹

- 1) *Miranda Rule* adalah suatu aturan yang mengatur hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana, sebelum diperiksa oleh penyidik atau instansi yang berwenang. Di Indonesia tidak semua prinsip-prinsip *Miranda Rule* diakomodir kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. hanya dua prinsip *Miranda Rule* yang telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan, yaitu: Hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum/advokat Pasal 54, 55, dan 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan jika tidak mampu berhak untuk disediakan penasihat hukum/advokat Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) *Miranda Rights* adalah hak-hak tertentu seseorang yang disangka melakukan tindak pidana sebelum dirinya diperiksa yang harus dihormati

¹⁸ M. Yahya. Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*; Edisi ke dua. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.hlm 330

¹⁹ M. Sofyan Lubis dan M. Haryanto, *Pelanggaran Miranda Rule...Op,cit.* hlm. 12-15.

oleh penyidik atau pihak kepolisian. *Miranda Rights* yang diakui diseluruh dunia adalah sebagai berikut:

- a) Hak untuk diam, dan menolak untuk menjawab pertanyaan polisi sebelum diperiksa oleh penyidik;
 - b) Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum/advokat yang bersangkutan;
 - c) Hak untuk memilih sendiri penasihat hukumnya (Advokat);
 - d) Hak untuk disediakan penasihat hukum, jika tersangka tidak mampu menyediakan penasihat hukum/advokat sendiri.
- 3) Sedangkan *Miranda Warning* adalah peringatan yang harus diberikan oleh penyidik kepada tersangka/terdakwa. Dalam pelaksanaannya di Amerika, peringatan (*warning*) ini dikenal dengan *the four miranda warning*, yaitu :

“You have the right to remain silent, anything you say can be used against you in acourt of law. You have the right to speak to an attorney, and to attorney present during any questioning. If you can’t affor a lawyer, one will be provide for you at government expense.”

Tersangka sebelum diinterogasi harus diberikan informasi jelas bahwa mereka berhak untuk diam, dan segala apa yang dikatakannya bisa digunakan untuk melawannya di pengadilan. Tersangka berhak untuk mendapatkan bantuan dari penasihat hukum jika tersangka tidak mampu maka akan disediakan penasihat hukum secara gratis.

Polisi tidak bisa bertanya langsung kepada tersangka ditempat kejadian. Jika dilakukan, maka hal tersebut tidak sah dan tidak dapat dijadikan bukti untuk memberatkan tersangka di pengadilan. Namun Polisi tetap bisa menanyakan identitas tersangka, seperti: Nama, tempat tanggal lahir, alamat dan identitas lainnya, tanpa terlebih dahulu membacakan peringatan tersebut (*Miranda Warning*). Polisi dapat memberikan pertanyaan ringan, namun tentunya tersangka mempunyai hak untuk menolak memberikan jawaban. Penangkapan dinyatakan ilegal jika polisi mengabaikan dalam membacakan hak-hak untuk tersangka.

Tujuan prinsip *Miranda Rule* yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah agar terjamin pemeriksaan yang adil dan manusiawi terhadap diri tersangka/terdakwa, sebab dengan hadirnya penasihat Hukum untuk mendampingi, membela hak-hak hukum bagi tersangka atau terdakwa sejak dari proses penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan dimaksudkan dapat berperan melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan terhindar dari penyiksaan, pemaksaan dan kekejaman yang dilakukan oleh penegak hukum dalam proses peradilan sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dari uraian di atas, *Miranda Rule* dapat dikategorikan sebagai hak asasi manusia atau lebih khusus lagi sebagai Hak Tersangka/Terdakwa yang harus dipenuhi dalam semua tingkat penyidikan/pemeriksaan. Hakikat HAM adalah

kebebasan, akan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah kewilayah kebebasan orang lain.²⁰

Adapun pembahasan dan Penerapan yang menerangkan dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengandung berbagai aspek permasalahan hukum yaitu :

1. Mengandung aspek nilai Hak Asasi Manusia, sesuai dengan deklarasi “*universal*” Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang *inheren* pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai Hak Asasi Manusia
2. Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, sehingga mengabaikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum.
3. Bahwa Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan yang bernilai tinggi telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*, yang menegaskan apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan, tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, maka sesuai dengan

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 56.

Miranda Rule, pemeriksaan adalah sah atau batal demi hukum (*null and void*).²¹

Dapat disimpulkan bahwa setiap penyidik secara langsung mengkondisikan tersangka atau terdakwa hingga kedalam proses penyidikan ada yang di dampingi dan tidak di dampingi oleh pengacara dan tidak punya pilihan lain kecuali bersedia diperiksa tanpa didampingi penasihat hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya pelanggaran *Miranda Rule* di Indonesia karena belum banyak mendapatkan perhatian, baik dari para penegak hukum maupun pemimpin Negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, sehingga sangat terkesan pelanggaran itu dibiarkan. Di Amerika Serikat, pelanggaran terhadap *Miranda Rule* akan mengakibatkan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dan pengakuan yang dibuat oleh tersangka tidak sah.

IV. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana

i. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Jika diuraikan dari kata sistem, peradilan dan pidana dapat diartikan bahwa sistem adalah perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Dan pidana adalah kejahatan atau kriminal. Sistem peradilan pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi kejahatan yang dapat

²¹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Hlm 327

mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat dan merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan kejahatan agar tetap berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.²² Berikut ini adalah pengertian sistem peradilan pidana menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Soerjono Soekanto, sistem peradilan pidana merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional, sistem peradilan pidana tersebut terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing merupakan suatu subsistem dari sistem tersebut.²³
- b. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²⁴
- c. Menurut Remington dan Ohlin, sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.²⁵

²² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1997, hlm 140.

²³ Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remedja Karya, Bandung, 1988, hlm 68.

²⁴ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 18.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, hlm 14.

Jika ditelaah dan dianalisis dari beberapa arti menurut para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari adanya sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut :

- a. Mencegah terjadinya korban dalam masyarakat.
- b. Menanggulangi kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- c. Memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam pelaksanaan hukum pidana materiil harus bersandar pada pelaksanaan hukum pidana formil agar tercapainya tujuan pelaksanaan hukum pidana materiil itu sendiri. Suatu kejahatan terus-menerus terjadi karena lemahnya hukum pidana materiil jika didasari dengan penegakkan sistem peradilan yang lemah. Artinya harus adanya keselarasan antara pelaksanaan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Sistem peradilan pidana di Indonesia telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), merupakan komponen hukum pidana formil yang diharapkan mampu untuk mengawal penegakkan hukum pidana materiil.

ii. Asas-Asas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Berikut ini adalah beberapa asas-asas yang terdapat dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), antara lain :

- a. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Penjelasan secara umum yang tertuang dari beberapa pasal dalam KUHAP bahwa proses peradilan harus sesegera mungkin ditangani, menggunakan biaya perkara seminimal mungkin serta proses yang tidak menyulitkan para pihak terkait sehingga menghindari resiko terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Contoh dalam pasal 24 ayat (4), 25 ayat (4), 27 ayat (4), 50, 102 ayat (1), dan sebagainya.

b. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

Pada hakikatnya asas ini bersifat cukup mendasar pengertiannya dalam hukum acara pidana. Peraturan “asas praduga tak bersalah” ini tertuang dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dalam penjelasan umum angka 3 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan bahwa²⁶ :

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

c. Asas Oportunitas

Asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum²⁷.

d. Asas semua orang diperlakukan sama dimata hukum

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 14.

²⁷ Ibid, hlm 20.

Prinsip bahwa semua manusia diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*) merupakan prinsip yang dianut oleh negara hukum salah satunya yaitu Indonesia yang dituangkan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan umum angka 3 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa

“pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”

e. Asas tersangka atau terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum

Salah satu prinsip yang paling penting dalam melindungi hak asasi manusia atas tersangka atau terdakwa untuk memperoleh rasa keadilan adalah dengan mendapatkan bantuan hukum. Di dalam pasal 54 sampai dengan pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum. Dalam pasal 69 sampai dengan pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka atau terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan tersebut antara lain sebagai berikut²⁸ :

1. Bantuan hukum dapat diberikan sejak tersangka ditangkap atau ditahan.
2. Bantuan hukum dapat diberikan pada tahapan semua tingkat pemeriksaan.
3. Penasihat hukum dapat menghubungi tersangka atau terdakwa pada tahap semua tingkat pemeriksaan.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.hlm 17.

4. Pembicaraan antara penasihat hukum dan tersangka tidak dapat didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.
5. Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum untuk kepentingan pembelaan.
6. Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa.

f. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan dengan lisan

Pelaksanaan pemeriksaan hakim di pengadilan pada praktiknya akan dilaksanakan secara langsung antara hakim terhadap terdakwa dan saksi-saksi yang dilakukan secara lisan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tetapi adakalanya hakim menggunakan sedikit bahasa daerah dimana tempat domisili pengadilan berada untuk mempermudah komunikasi dengan terdakwa serta saksi-saksi. Penjelasan prinsip tersebut tercantum dalam penjelasan umum angka 3 huruf h, pasal 153-155 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.²⁹

g. Asas peradilan terbuka untuk umum

Pemeriksaan pengadilan diartikan sebagai pemeriksaan kasus pada saat penyidikan sampai adanya pra peradilan yang diselenggarakan terbuka untuk umum kecuali kasus yang berkaitan dengan kesusilaan dan terdakwa anak.

²⁹ Ibid, hlm 18.

Penjelasan tersebut tertuang dalam pasal 153 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



BAB III

METODE PENELITIAN

I. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuwan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode.

Oleh karena itu ruang lingkup penelitian ini adalah khususnya pada disiplin Ilmu Hukum dalam hal ini adalah Sistem Peradilan Pidana maka dengan demikian peneliti ingin berorientasi pada penelitian Normatif.

1. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. pendekatan konseptual dilakukan manakala, peneliti tidak beranjak dari

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. hlm 35

aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan dengan menelaah pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa/tersangka dalam penyelesaian perkara pidana. Analisis terhadap bahan hukum tersebut guna memahami permasalahan dan solusi yang tepat berdasarkan kebijakan hukum.

2. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang digunakan mengenai bahan dan aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki. Bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan Perundang-Undangan, catatan resmi ataupun risalah dalam pembuatan peraturan Perundang-Undangan maupun putusan hakim³.

Adapun yang menjadi bahan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. hlm 35

³ Jonny Ibrahim, *Teory & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia, Malang, 2007, hlm. 141.

- c. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- d. Pasal 56, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Literatur-literatur hukum, khususnya yang mengenai Bantuan Hukum;
- b. Karya Ilmiah, yang membahas mengenai Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- c. Artikel internet, yang berkaitan dengan akibat hukum dari tidak dilaksanakannya Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan
- d. Pendapat para sarjana, mengenai pengertian-pengertian tentang hak – hak terdakwa dalam pasal 56 ayat (1) tentang pemberian bantuan hukum serta akibat hukum tidak dilaksanakannya pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan

bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.⁴ Bahan hukum primer di dapat dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Brawijaya. Bahan hukum sekunder di dapat dari hasil analisis beberapa putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri tentang tidak dilaksanakannya Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahan hukum tersier didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia online, maupun kamus hukum yang dapat menjelaskan mengenai bantuan hukum .

2. Teknik Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional⁵. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal

⁴ Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta. 2005, hlm. 21.

⁵ *Ibid.* hlm. 20.

yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Kemudian menginventarisasi dan mengidentifikasi dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, selanjutnya analisis dikaitkan dengan isu hukum yang terjadi dengan melakukan penafsiran terhadap undang – undang yang terkait. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan undang – undang dan peraturan yaitu:

- a. Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- c. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- d. Pasal 56, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam penafsiran undang – undang dan peraturan tersebut, peneliti menggunakan penafsiran :

1) Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-

undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.⁶

Penafsiran ini digunakan dalam penelitian ini untuk mempermudah serta mengetahui makna dari makna dari Undang-Undang.

2). Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.⁷ Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

Penafsiran ini digunakan untuk memperoleh hasil perbandingan antara pasal-pasal sebagai pertimbangan makna dari undang-undang tersebut.

3. Definisi Konseptual

a. Hak

Kewenangan yang diberikan oleh hukum secara obyektif kepada subjek hukum dan badan hukum yang kemudian harus dilindungi oleh hukum itu sendiri.

⁶ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm. 9

⁷ Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta. 2005, hlm. 11.

b. Kewajiban

Suatu beban atau tanggung jawab yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum ataupun badan hukum.

c. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah suatu bentuk bantuan untuk menegaskan adanya suatu hak yang harus di hormati dan dihargai, agar terciptanya suatu keadilan dalam hukum.

d. Tersangka

Tersangka adalah seseorang atau subjek hukum yang karena perbuatannya atau keadaannya melakukan kesalahan yang melawan hukum sebagai tindak pidana.

e. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum yang harus di pertanggungjawabkan dimana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum dan mempunyai sanksi pidana.

f. Proses Peradilan pidana

Proses Peradilan adalah suatu proses rangkaian acara peradilan pidana dalam tahapan persidangan yang terjadi dengan tujuan untuk mencari keadilan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Makna Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum yang termuat dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kewajiban pemberian bantuan hukum yang termuat dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dalam praktiknya. Dimana penafsiran tersebut sering kali mengabaikan makna kata “ wajib “ yang terkandung dalam pasal tersebut, sehingga menjadikan tidak terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Kewajiban berasal dari kata wajib. Menurut Prof. Dr. Notonegoro wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu yang tidak didapatkan oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.¹ Kewajiban pada intinya adalah sesuatu yang harus dilakukan. Disini kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksanakannya tanpa ada alasan apapun itu. Dari pengertian yang lain kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab.

¹ Notonegoro, *Pancasila dasar falsafah negara*, C.V Panjutan T, 1962. Hlm 35

Wujud hubungan antara warga negara dengan negara adalah pada umumnya adalah berupa peranan (role).² Peranan pada dasarnya adalah tugas apa yang dilakukan sesuai dengan status yang dimiliki, dalam hal ini sebagai warga Negara. Dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menjelaskan yaitu :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Berdasarkan bunyi Pasal di atas, dapat diketahui bahwa terdapat kewajiban bagi aparat penegak hukum pada semua tingkat proses pemeriksaan untuk menyediakan penasihat hukum bagi tersangka yang telah memenuhi syarat untuk diberikan bantuan hukum. Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak diimbangi dengan adanya sanksi bagi aparat penegak hukum apabila tidak memenuhi kewajibannya. Dengan ketiadaan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif, menyebabkan kewajiban ini sering diabaikan oleh aparat penegak hukum.

² *Ibid.* Hlm 36

Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

a. Jika tersangka atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana :

1. Hukuman mati,
2. Hukuman lima belas tahun atau lebih

Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini, tidak dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayai sendiri. penasihat hukum yang dikehendaknya. Jika tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri, pada saat itu timbul “kewajiban” bagi pejabat yang bersangkutan untuk memberikan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa. Kalau tersangka atau terdakwa sendiri menyediakan penasihat hukumnya, hapus kewajiban pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum. apabila tersangka atau terdakwa tidak mampu atau tidak ada memberikan penasihat hukum, dengan sendirinya timbul kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk memberikan penasihat hukum.

b. Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa, digantungkan pada dua keadaan :

1. Tersangka atau terdakwa “tidak mampu” menyediakan sendiri penasihat hukumnya, dan

2. Ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau tidak wakan lima tahun atau lebih.

Syarat kedua, digantungkan kepada beratnya ancaman hukuman, lima tahun atau lebih. Kalau ancaman hukuman pidana yang disangkakan atau tidak wakan kepadanya lima tahun atau lebih, dan dia tidak mampu menyediakan penasihat hukum, pejabat yang bersangkutan dalam setiap tahapan penyidikan sampai proses peradilan “wajib” menunjuk penasihat hukum untuk tersangka atau terdakwa sesuai ketentuan dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Bantuan Hukum berbeda dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut UU Advokat). Undang-Undang Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh negara kepada orang atau kelompok orang miskin, sedangkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat merupakan bentuk pengabdian yang diwajibkan oleh Undang-Undang kepada para advokat untuk klien yang tidak mampu. Adapun cara negara memberikan bantuan hukum tersebut dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum.

Pengertian Bantuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa ³:

“Bantuan hukum yang dimaksud KUHAP meliputi pemberian jasa bantuan hukum secara profesional dan formal, dalam bentuk pemberian jasa bantuan hukum setiap orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana, baik secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dan miskin maupun memberi bantuan kepada mereka yang mampu oleh para advokat dengan jalan menerima imbalan jasa”.

Sedangkan Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa

“Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Berdasarkan ketentuan di atas diketahui bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh penasihat hukum yang telah ditunjuk haruslah cuma-cuma dan tanpa pemungutan biaya apapun. Namun, dalam praktiknya masih banyak advokat yang masih meminta biaya dalam memberikan bantuan hukumnya kepada tersangka.

Pemberian Bantuan hukum dalam pengertian yang paling luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu mempunyai tiga aspek yang paling berkaitan,

³M.Yahya. Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP;Penyidikan dan Penuntutan*; Edisi ke dua. Jakarta: Sinar Grafika. 2010. hlm 37

yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.⁴

Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum (pidana) merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga betapapun sempurnanya substansi hukum pidana tanpa penegakan hukum, maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana.⁵ Substansi bantuan hukum di Indonesia menjadi pertanyaan paling mendasar, yaitu apakah bantuan hukum itu bersifat wajib ataukah baru diwajibkan setelah beberapa syarat tertentu dipenuhi. Bantuan hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa raga tersangka atau terdakwa.⁶

Diwajibkan ketika syarat-syarat yang terdapat dalam uraian diatas terkait pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terpenuhi, namaun yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah siapa yang dimaksud

⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widja Padjajaran. Bandung, 2009. hlm 245

⁵ Abdussalam, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2008, hlm. 25.

⁶ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni, 2006, h. 237.

dengan masyarakat yang kurang mampu atau tidak mampu yang berhak mendapatkan pemberian bantuan hukum ? menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah Pemberian bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu sama tuanya dengan profesi hukum itu sendiri.⁷ Hal ini dilakukan atas dasar amal dengan tujuan utama untuk memberikan kepada orang-orang tak mampu kesempatan yang sama dalam usaha mereka untuk mencapai apa yang dikehendakinya melalui jalan hukum.

Menurut Zulaidi Pemberian Bantuan Hukum berasal dari istilah “*legal asisstance dan legal aid*”. *Legal aid* biasanya digunakan untuk pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada orang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan *legal assistance* adalah istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, yang menggunakan honorium.⁸

Legal aid adalah bantuan hukum sistem nasional yang diatur secara lokal dimana bantuan hukum ditujukan bagi mereka yang kekurangan keuangannya dan tidak mampu membayar penasihat hukum pribadi. Tujuan dari bantuan hukum *legal aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, *Bantuan Hukum di Indonesia Terutama dalam Hubungannya dengan Pendidikan Hukum*, CV.Binacipta, Bandung, 1975. hlm 4-5

⁸ Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widja Padjajaran. Bandung, 2009. hlm 246

membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan tidak mengerti hukum.

Legal assistance lebih memaparkan profesi dari penasihat hukum sebagai ahli hukum. Sehingga dalam pengertian itu, sebagai ahli hukum penasihat hukum dapat menyediakan jasa bantuan hukum untuk siapa saja tanpa terkecuali. Artinya, keahlian dari seorang ahli hukum dalam memberikan bantuan hukum tidak terbatas pada kondisi seseorang yang miskin melainkan kepada siapa saja tanpa terkecuali.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang dalam bukunya ada tiga konsep tentang Pemberian bantuan hukum yang ada di Indonesia, yaitu⁹ :

1. Konsep Pemberian Bantuan Hukum Tradisional

Konsep ini merupakan pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, bantuan hukum bersifat pasif dengan pendekatan secara formal dan legal. Konsep ini berarti juga dalam melihat segala bentuk permasalahan hukum dari masyarakat yang miskin atau tidak mampu dari sudut pandang hukum yang berlaku, serta mempunyai konsep yang normatif. Dalam artian melihat segala permasalahan sebagai hukum untuk kaum miskin semata-mata dari sudut pandang hukum yang berlaku. Konsep ini merupakan

⁹ *Ibid.* hlm 250-251

konsep yang sudah lama, yang menitik beratkan kepada kasus-kasus yang menurut hukum harus mendapatkan pembelaan.

2. Konsep Pemberian Bantuan Hukum Konstitusional

Konsep ini merupakan bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dengan usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas seperti: menyadarkan pentingnya hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama untuk tegaknya negara hukum yang adil. Bantuan hukum ini adalah lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

3. Konsep Pemberian Bantuan Hukum Struktural

Konsep ini merupakan kegiatan yang bertujuan terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju kearah struktural yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan baik dilapangan hukum atau politik. Konsep bantuan hukum struktural ini erat kaitannya dengan kemiskinan struktural.

Dengan demikian konsep pemberian bantuan hukum di Indonesia khususnya bagi warga negara yang tidak mampu konsep pemberian bantuan hukum secara structural merupakan aktivitas bantuan hukum dengan suatu rangkaian program melalui jalur hukum dan non-hukum yang diarahkan bagi perubahan pada hubungan yang menjadi dasar kehidupan social menuju pola

hubungan yang lebih seajar. Dalam pembelaan masyarakat, konsep bantuan hukum struktural tidak hanya ditujukan terhadap kasus-kasus individual, akan tetapi juga diprioritaskan terhadap kasus-kasus kolektif.

Konsep Pemberian bantuan hukum struktural yang kemudian mengilhami kerja-kerja kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di seluruh Indonesia. Sudah jelas bahwa kerja-kerja bantuan hukum struktural lebih ditujukan kepada masyarakat miskin yang *"buta hukum"* dan tidak mampu secara ekonomi, dan bukan ditujukan terhadap masyarakat yang sudah memahami hukum dan mempunyai kapasitas ekonomi yang cukup.

Berdasarkan pertimbangan hukum, kewajiban pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban negara dan negara yang menentukan syarat-syarat bagi pemberi dan penerima bantuan hukum. Cara negara memberikan bantuan hukum adalah dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum. Advokat yang memberikan bantuan hukum merupakan pelaksanaan bantuan hukum oleh negara yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum oleh negara terdapat dalam dasar falsafah Hak asasi Manusia (HAM) di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin tegaknya negara hukum Indonesia sebagaimana diisyaratkan dalam penjelasan dan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum sebenarnya terasa betul ketika anggota masyarakat masuk ke dalam suatu rangkaian proses

hukum di mana tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan pembelaan dari advokat untuk menjamin tercapainya proses hukum yang adil (*due process of law*) dan mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu oleh negara ketika warga negara berhadapan dengan kepentingan negara dalam suatu perkara hukum, atau ketika masyarakat berhadapan dengan instrumen-instrumen negara yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dan proses peradilan. Karena itu perlu adanya jaminan negara bagi warga negaranya untuk mendapatkan bantuan hukum, yang salah satunya dapat diberikan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁰

Selain sebagai kewajiban negara, kewajiban pemberian bantuan hukum juga untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat dengan menyediakan dana bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk merealisasikan tanggung jawab konstitusionalnya mendanai program bantuan hukum untuk warga negaranya. Sebagai wujud dari tanggung jawab negara terhadap fakir miskin yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak fakir miskin yang diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 menjadi relevan untuk didukung dengan dana yang diperoleh dari negara maupun masyarakat.¹¹

¹⁰ Binziad Kadabi, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation, 2001. Hlm 219-220

¹¹ Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009. Hlm 174

Dalam menjalankan kewajibannya untuk menyediakan penasihat hukum secara cuma-cuma bagi tersangka yang diancam dengan pidana diatas 5 (lima) tahun, tentunya masih tetap memerlukan biaya demi terlaksananya pemberian bantuan hukum tersebut. Oleh sebab itu Polda Jabar telah mengalokasikan dana khusus bagi pembiayaan bantuan hukum cuma-cuma. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Untuk mendapatkan dana tersebut ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh Polda Jabar terlebih dahulu. Pertama, seluruh satuan kerja Direktorat di Polda Jabar mengadakan rapat perencanaan untuk menyusun anggaran perencanaan bagi pelaksanaan kegiatan penyidikan di Polda Jabar, karena seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan Polda Jabar harus berdasarkan apa yang tertera pada anggaran.

Anggaran perencanaan ini dibuat untuk jangka waktu satu tahun. Kedua, melalui Biro Perencanaan dan Pengembangan (Rorenbang), anggaran perencanaan tersebut dikirimkan ke Markas Besar Polisi Republik Indonesia (MABES POLRI) kemudian MABES POLRI mengirimkannya ke Badan Pembendaharaan Keuangan negara (BPKN). Ketiga, setelah disetujui, dana tersebut diberikan ke Markas Besar POLRI terlebih dahulu untuk kemudian diserahkan ke Polda Jabar.

Setiap dana yang digunakan harus dituliskan dalam daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) karena apabila ada kelebihan dana yang diberikan oleh pemerintah, maka dana tersebut harus segera dikembalikan

Dari dana APBN yang diberikan pemerintah, Ditreskrim Polda Jabar rata-rata mendapatkan Rp. 115.000.000 (seratus lima belas juta rupiah) setiap bulannya. Dana tersebut digunakan bagi seluruh kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Jabar, termasuk bagi kegiatan pemberian bantuan hukum bagi tersangka. Dana bagi pemberian bantuan hukum cuma-cuma masuk dalam dana penyidikan Ditreskrim Polda Jabar. Dana yang diberikan bagi pemberian bantuan hukum cuma-cuma adalah sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bagi setiap pengacara. Mengenai jumlah total yang diberikan bagi pemberian bantuan hukum tidak ditetapkan karena jumlah yang diberikan tergantung pada banyaknya jumlah dana yang tersisa.¹²

Undang-Undang Bantuan Hukum justru menjelaskan dan memperluas para pihak yang berkewajiban atau dapat memberikan bantuan hukum. Tidak hanya advokat saja yang berkewajiban memberikan bantuan hukum, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum, termasuk mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian, yang direkrut sebagai pemberi bantuan hukum (*vide* Pasal 9 huruf a Undang-Undang Bantuan Hukum dan Penjelasanannya); Dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004, tertanggal 13 Desember 2004, halaman 290, Mahkamah Konstitusi berpendapat antara lain sebagai berikut :

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Dedi Budiyan, Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar, 14 November 2017.

“Menimbang bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang sebagaimana dimaksud, keberadaan dan peran lembaga-lembaga nirlaba semacam LKPH UMM, yang diwakili Pemohon, adalah sangat penting bagi pencari keadilan, teristimewa bagi mereka yang tergolong kurang mampu untuk memanfaatkan jasa penasihat hukum atau advokat profesional. Oleh karena itu, adanya lembaga semacam ini dianggap penting sebagai instrumen bagi perguruan tinggi terutama Fakultas Hukum untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam fungsi pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu, pemberian jasa bantuan hukum juga dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan tinggi hukum dengan kategori mata kuliah pendidikan hukum klinis dan ternyata membawa manfaat besar bagi perkembangan pendidikan hukum dan perubahan sosial, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman negara-negara Amerika Latin, Asia, Eropa Timur, Afrika Selatan, bahkan juga negara yang sudah tergolong negara maju sekalipun seperti Amerika Serikat”.

Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum juga tercantum Dalam Pasal 56

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang didalamnya menegaskan ;

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Kata “wajib” dalam rumusan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini adalah sebuah bentuk tanggung jawab negara untuk keadilan atas sebuah hak yang melekat pada warga negaranya, pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku apabila tersangka berada dalam kondisi, *Pertama*, jika sangkaan atau dakwaan diancam dengan pidana hukuman mati, hukuman 15 tahun atau lebih. *Kedua*, tersangka atau terdakwa

“tidak mampu” menyediakan sendiri penasihat hukumnya, dan ancaman hukuman pidana yang bersangkutan atau didakwakan 5 tahun atau lebih. Namun dengan tidak adanya sanksi yang diatur dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, baik sanksi pidana maupun sanksi administratif, menyebabkan kewajiban ini sering diabaikan oleh aparat penegak hukum dan juga para penasihat hukum.

Mahkamah Agung sendiri sudah cukup progresif dalam beberapa putusannya terkait bantuan hukum. Beberapa putusan berikut menegaskan hak bantuan hukum sebagai hak asasi seorang terdakwa yang selama ini diatur secara lemah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :

Putusan No. 2588/K/Pid.Sus/2010 atas nama Terdakwa Frengki dan Yusliadi Dalam kasus narkoba ini, para Terdakwa yang bernama Frengki dan Yusliadi dituduh membawa ganja. Namun, pada tingkat pertama para Terdakwa diputus bebas dan diperkuat oleh Mahkamah Agung yang salah satu pertimbangannya adalah terkait bantuan hukum, yaitu:

Keberatan memori kasasi JPU tidak dapat dibenarkan karena *judex factie* tidak salah dalam menerapkan hukum:

- a) *Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan JPU untuk menguji bantahan terdakwa;*
- b) *Selama pemeriksaan dari penyidik, kepada terdakwa tidak ada penasehat hukum yang mendampingi;*

- c) *Penasehat hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan di penyidik, Penasehat hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik*

Selain itu, Mahkamah Agung juga mengangkat praktik yang kerap digunakan kepolisian untuk mengakali hak atas bantuan hukum. Mahkamah Agung menganggap hak Terdakwa atas bantuan hukum tidak dipenuhi karena Penasehat Hukum hanya dimintai untuk menandatangani Berita Acara Perkara oleh polisi tanpa pernah sekalipun mendampingi Terdakwa dalam proses penyidikan. Hal ini merujuk pada banyaknya kasus dalam pengabaian pelaksanaan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Putusan pengadilan di atas merupakan putusan yang progresif oleh *judex facti*, tetapi tidak bernilai yurisprudensi terhadap putusan hakim-hakim lainnya dan juga terhadap pejabat dalam setiap tahapan penyidikan ataupun bagi penasihat hukum lainnya karena di Indonesia tidak menerapkan *asas stare decisis* dimana teori *stare decisis* mengungkapkan bahwa putusan pengadilan ataupun hakim saat ini untuk kasus yang sama, harus memutuskan sama seperti yang pernah diputus di masa lalu, serta karena tidak adanya sanksi yang jelas ketika tidak dijalkannya syarat-syarat dalam pemenuhan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Pemahaman hukum menurut Hukum Progresif menegaskan, Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan

yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.¹³ Lalu menurut Moh. Mahfud MD juga mengakui hukum progresif sulit dibuat perdefinisi. Namun, menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, hukum progresif bagi hakim adalah hukum yang bertumpu pada keyakinan hakim, dimana hakim tidak terbelenggu pada rumusan undang-undang. Menggunakan hukum progresif, seorang hakim menjadi berani mencari dan memberikan keadilan dengan melanggar undang-undang.¹⁴

Berangkat dari definisi tersebut, terdapat 2 (dua) pokok penekanan Hukum Progresif yaitu: hukum merupakan institusi atau alat dan hukum memiliki tujuan agar adil, sejahtera dan bahagia. Posisi manusia dalam definisi tersebut lebih menjadi 'tuan' yang dilayani oleh hukum agar dapat menikmati keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Seperti halnya sebuah alat apabila tidak lagi berfungsi dengan baik yang dapat dilihat dari hasil yang ditunjukkan maka alat itu pun dapat dibuang oleh sang 'tuan' yaitu manusia. Dalam konsep hukum progresif, posisi manusia menjadi sentral utama dalam menilai hukum apakah benar dan baik ataukah sebaliknya. Implikasinya ketika manusia dalam setiap proses perkembangannya selalu berubah sesuai dengan kebutuhan kehidupannya, maka hukum juga harus mengikuti perubahan tersebut.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta Genta Publishing, Cetakan I, 2009. hlm. 2

¹⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a1c8c3320c1/progresivitas-dalam-putusan-pengadilan> diakses 8 mei 2018 pukul 11.58 WIB

Berdasarkan Uraian diatas, Penulis menyimpulkan Dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum adalah sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negaranya yang diperluas di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan melibatkan tidak hanya advokat, tetapi juga paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum. Hal ini karena kewajiban pemberian bantuan hukum diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Dengan demikian para pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin harus mendapatkan bantuan hukum dalam proses hukum untuk mendapatkan keadilan.

Orientasi dan tujuan kewajiban pemberian bantuan hukum adalah usaha mewujudkan negara hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga konsekuensi atas tidak dijalankannya peraturan tersebut oleh pejabat dalam semua tahapan penyidikan ataupun penasihat hukum menjadikan perlu adanya pembaharuan dalam sistem bantuan hukum di Indonesia baik yang termuat dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum, yang dilakukan oleh Pemerintah.

B. Akibat hukum yang terjadi jika hak-hak terdakwa atau tersangka atas bantuan hukum tidak dipenuhi

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana prosedur pemeriksaan seorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana hingga tersangka atau terdakwa diputus atau divonis oleh pengadilan. Di dalamnya juga mengatur tentang hak-hak tersangka atau terdakwa yang wajib dihormati, dan dipenuhi oleh aparat penegak hukum dalam setiap tahapan penyidikan agar penyidikan terhadap tersangka atau terdakwa berjalan secara adil dan berimbang.

Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum adalah instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana karena merupakan bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya terhadap hak atas kebebasan dan hak atas jiwa-raga.¹⁵ Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pemberian bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa sejak proses penyidikan hingga proses persidangan bertujuan agar proses pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa dapat berjalan secara adil (*fair*) dan terbuka sehingga hak asasi tersangka atau terdakwa dapat terlindungi, terutama dalam proses penyidikan. Kehadiran seorang penasihat hukum untuk mendampingi tersangka selama proses penyidikan dapat menghindarkan tersangka dari penggunaan kekerasan yang berupa penyiksaan dan pemaksaan yang dilakukan oleh penyidik dalam usahanya memperoleh pengakuan dan keterangan dari tersangka.

¹⁵ O.C. Kaligis, *op.cit.*, hlm. 237.

Seperti dalam putusan Mahkamah Agung No. 2026/K/Pid/2011 atas nama Hartono alias Toni bin Umar dimana Dalam perkara atas nama Hartono alias Toni bin Umar ini, Terdakwa dituduh melakukan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Selain mengangkat poin tentang bantuan hukum, Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan adanya penyiksaan dalam perkara ini yang menyebabkan Terdakwa cedera (patah tulang kaki). Pertimbangan Mahkamah Agung menyatakan:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu:

- 1) Bahwa, ada penekanan dan penyiksaan terhadap Terdakwa di mana Terdakwa telah dipukuli sehingga patah tulang kakinya;*
- 2) Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum selama dalam penyidikan, padahal Terdakwa diancam hukuman mati dan sesuai Pasal 56 ayat (1) KUHAP Terdakwa wajib didampingi Penasehat Hukum ;*

Keberatan memori kasasi JPU tidak dapat dibenarkan karena judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum : Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan JPU untuk menguji bantahan terdakwa

Sehubungan dengan perlindungan hak asasi manusia, Negara menjamin hak-hak konstitusional warga negaranya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Salah satu jaminan konstitusional dalam hukum yang dimaksud adanya Hak Atas Bantuan Hukum yang diterima tersangka atau terdakwa

dalam proses penyelesaian perkara pidana, dimana Kewajiban pemenuhan hak konstitusional tersebut adalah tanggung jawab Negara untuk warga negaranya.

Hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum dikenal luas dengan istilah *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*. *Miranda Rule* adalah hak-hak konstitusional yang dimiliki tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat yang bersangkutan dalam setiap proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan. *Miranda Rule* adalah hak konstitusional yang bersifat *universal* di hampir semua negara yang berdasarkan hukum. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum pada dasarnya sangat menghormati *Miranda Rule*. Komitmen terhadap penghormatan *Miranda Rule* dibuktikan dengan dimuatnya prinsip *Miranda Rule* ke dalam sistem Hukum Acara Pidana yaitu sebagaimana yang termuat dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁶

Adapun prinsip-prinsip *Miranda rule* yang menjadi pembahasan dan Penerapan yang termuat dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengandung berbagai aspek permasalahan hukum yaitu :

¹⁶ Sofyan Lubis dalam *Miranda Rule Dalam KUHP*, *op.cit.*

1. Mengandung aspek nilai Hak Asasi Manusia, sesuai dengan deklarasi “*universal*” Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa hadirnya penasihat hukum untuk mendampingi tersangka atau terdakwa merupakan nilai yang *inheren* pada diri manusia. Dengan demikian mengabaikan hak ini bertentangan dengan nilai Hak Asasi Manusia.
2. Pemenuhan hak ini dalam proses peradilan pada semua tingkat pemeriksaan, menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan, sehingga mengabaikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini mengakibatkan hasil pemeriksaan tidak sah dan batal demi hukum.
3. Bahwa Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan yang bernilai tinggi telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda Rule* atau *Miranda Principle*, yang menegaskan apabila pemeriksaan penyidikan, penuntutan, atau persidangan, tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, maka sesuai dengan *Miranda Rule*, pemeriksaan adalah sah atau batal demi hukum (*null and void*).¹⁷

Prinsip-prinsip *miranda principle*, di negara Indonesia telah diimplementasikan ke dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu hak untuk mendapatkan atau menghubungi penasihat hukum atau advokat, dan

¹⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Hlm 327

jika tidak mampu maka berhak untuk disediakan penasihat hukum/ advokat. Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut prinsip *Miranda Rule*, isi dari asas tersebut ialah sebagai berikut:

“Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum”.¹⁸

Kehadiran Penasehat Hukum dalam tahap penyidikan pada intinya dimaksudkan untuk dapat melakukan kontrol, sehingga proses pemeriksaan berlangsung adil dan manusiawi dengan menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah *presumption of innocence* dalam proses peradilan dan terhindar dari pelanggaran HAM (Pasal 33, Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dari UU No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Tujuan prinsip *Miranda Rule* yang terdapat di dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah agar terjamin pemeriksaan yang adil dan manusiawi terhadap diri tersangka/terdakwa, sebab dengan hadirnya penasihat Hukum untuk mendampingi, membela hak- hak hukum bagi tersangka atau terdakwa

¹⁸ Luhut Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002.
hlm 5

Salah satu tujuan pokok yang hendak dicapai atas penegakan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah agar terjaminnya proses peradilan yang adil (*fair*) dan menjunjung tinggi HAM.¹⁹ Namun dalam pelaksanaannya, penegakan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum dapat terlaksana sepenuhnya. Ada beberapa masalah terjadi. Misalnya tersangka tidak didampingi penasihat hukum pada saat tahapan pemeriksaan. Kalaupun ada penasihat hukum, penasihat hukum dimaksud hanya sebagai formalitas saja, tidak untuk menjalankan tugas yang seharusnya dilakukan sebagai advokat.

Pertanyaannya, apa konsekuensi atau akibat hukum jika hak didampingi penasihat hukum tidak dipenuhi oleh penyidik. Ini yang akan kita bahas selanjutnya. Tidak diterapkannya Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang, suatu pelanggaran terhadap undang-undang tentunya akan menimbulkan suatu akibat hukum.

Guna mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap suatu proses penyidikan yang disebabkan kelalaian penyidik dalam memberikan bantuan hukum kepada tersangka sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dapat kita lihat dalam salah satu putusan Mahkamah Agung No. 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16

¹⁹ Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 237.

September 1993. Dalam kasus ini, proses pemeriksaan pada semua tingkatan penyidikan melanggar Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni penyidikan berlanjut terhadap tersangka tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Pelanggaran ini dijadikan alasan kasasi, dan dibenarkan oleh peradilan tingkat kasasi, yang menyatakan :

“Apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima”

Berdasarkan putusan di atas, maka dapat diketahui mengenai akibat hukum yang timbul dengan diabaikannya Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Jika Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan atas dasar hasil penyidikan yang *illegal* kemudian, dakwaan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan pemeriksaan dalam pengadilan, maka dakwaan menjadi tidak sah atau *illegal* (tidak dapat diterima), sebagai konsekuensi hukum atas tidak dapat diterimanya tuntutan penuntut umum, maka terhadap tersangka atau terdakwa dapat diputus bebas karena adanya pelanggaran pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993.

Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima. Putusan atau Eksepsi ini diatur dalam pasal 263 ayat (2) huruf a dan pasal 266 ayat (2) huruf b KUHP. Didalam ketentuan pasal-pasal tersebut menyatakan dibolehkannya

putusan hakim dengan amar putusan, **tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima**. Eksepsi jenis ini merupakan keberatan terhadap tindakan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum.

Menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya , menjelaskan²⁰ :

Eksepsi tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima adalah Eksepsi yang dilakukan oleh Terdakwa atau Penasihat hukumnya apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang diminta ketentuan Undang-undang. Dalam mengajukan Eksepsi ini, permohonan yang terhadap hakim adalah agar hakim menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan bahwa tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Yang masuk dalam kategori tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dalam eksepsi ini adalah²¹ :

- a. **Eksepsi pelanggaran Miranda Rule, bahwa penyidikan tidak memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP.**
- b. Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat *klacht delict*
- c. Eksepsi penyidikan tidak memenuhi ketentuan yang diwajibkan dalam KUHP dan atau peraturan perundangan lainnya yang berkaitan.

²⁰ Yahya Harahap, *op cit.* hlm 121.

²¹ *Ibid*, hlm 121

Sedangkan menurut Lililik Mulyadi, SH., MH., menjelaskan,²² Yang dimaksud Eksepsi tuntutan Penuntut umum tidak dapat diterima, adalah :

1. Apa yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah Kadaluwarsa.
2. Bahwa adanya *asas nebis in idem*, yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama.
3. Bahwa tidak ada unsur pengaduan padahal terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang masuk dalam kategori delik, aduan *klacht delict*.
4. Adanya unsur yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, disangkakan

Teori dan alasan-alasan diatas seringkali digunakan terhadap suatu putusan yang kemudahan membolehkannya Eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, diantaranya dari yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut:

- I. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Pid/1988, tanggal 28 April 1988, yang menyatakan : tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

²² Lilik Mulyadi, *op.cit.* Hlm. 102

II. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993, yang menyatakan: apabila syarat-syarat permintaan dan/atau hak tersangka/terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 34/Pid.B/1995/PN.Tgl, tanggal 26 Juni 1995, yang menyatakan : penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri tidak sah karena Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Terhadap adanya Eksepsi Terdakwa atau Penasihat Hukumnya Hakim Wajib memberikan “putusan sela”, apakah menerima atau menolak eksepsi tersebut. putusan lainnya dapat berbentuk putusan sela yang berarti putusan tersebut dijatuhkan sebelum dijatuhkannya putusan akhir. Dapat juga suatu putusan sela bersifat dan berbentuk suatu putusan akhir, yang berarti bahwa pemeriksaan perkara tersebut dinyatakan berhenti. Putusan ini mengandung konsekuensi berlakunya asas *Nebis In Idem*. (vide : Surat Ederan MARI No.3 Tahun 2002 tertanggal 30 Januari 2002 tentang *Nebis In Idem*).

Penulis menilai bahwa putusan sela merupakan salah satu alat kontrol terhadap kinerja Jaksa / Penuntut Umum, yang mana dimaksudkan agar mereka tidak gegabah dalam membuat surat dakwaan, dalam mengajukan suatu

tuntutan dan atau dalam melakukan suatu penyidikan. Dalam praktik ada putusan sela yang menyatakan bahwa tindakan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan surat dakwaannya dibuat berdasarkan penyidikan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, antara lain penyidikan dalam perkara pidana yang diancam dengan hukuman mati, 15 tahun penjara atau diancam dengan pidana 5 tahun penjara atau lebih bagi yang tidak mampu, dimana terdakwa atau tersangka dalam proses penyidikan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum (Advokat), karena Pejabat yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Tersangka atau Terdakwa, maka hasil penyidikan dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum sekalipun penyidik telah mendapatkan surat pernyataan tersangka yang tidak bersedia menggunakan penasihat hukum. Bahwa kalau ada yang demikian ini maka Penyidik sesungguhnya telah melanggar pasal 56 ayat (1) KUHAP dan hasil penyidikan (BAP) terhadap perkara ini jika ada eksepsi dari Advokat, Hakim harus berani menyatakan dalam putusan selanya, hasil penyidikan (BAP) terhadap diri tersangka Batal Demi Hukum. Ada juga suatu putusan sela tersebut adalah merupakan putusan akhir dari perkara tersebut yang telah bersifat final.

Adapun terhadap pendapat kalangan Akademisi yang mengatakan bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam *unsur nebis in idem* adalah terdakwa telah dijatuhi putusan berdasarkan pokok perkaranya yang isi putusannya

berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan adalah kurang tepat atau salah, karena sesungguhnya ada eksepsi yang belum menyangkut pokok perkara dan putusannya bersifat final serta dalam putusan tersebut berlaku asas *nebis in idem*, yaitu antara lain yang menyangkut eksepsi “kewenangan mengadili” (*exseption of incompetency*) baik absolut maupun relatif dan dalam eksepsi “kewenangan menuntut, gugur”, yaitu ;

- 1) eksepsi *judicate* (pasal 76 KUHP)
- 2), eksepsi *in tempores* (pasal 78 KUHP),
- 3) terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP).

Oleh karena itu putusan sela atas adanya Eksepsi dari Penasihat Hukum itu sangat perlu, dan hal tersebut merupakan mekanisme tersendiri bagi para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Jika ada suatu perkara yang ternyata berhenti karena adanya putusan sela yang mengabulkan eksepsi dari Penasihat Hukum, dimana kriteria isi putusan sela telah memenuhi syarat diberlakukannya asas *Nebis In Idem* maka hal tersebut harus dipandang bahwa kepastian hukum terhadap perkara tersebut adalah sampai disitu.

Kewajiban untuk menunjuk Penasihat Hukum seperti dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut adalah bersifat *imperatif*, Kewajiban penyidik timbul manakala tersangka yang diduga melanggar tindak pidana yang ancaman hukumannya tinggi, misalnya tindak pidana

dengan ancaman pidana diatas 5 tahun atau 15 tahun. Untuk perkara dengan sanksi tinggi ini, bagi penyidik tidak ada pilihan lain dan tidak ada tawar menawar, wajib hukumnya harus menerapkan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP. Karena pasal tersebut bersifat *imperatif* (wajib) dipatuhi oleh setiap penegak hukum dalam semua tingkat pemeriksaan. Dan apa yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari asas *presumption of innocence* dan hak-hak asasi serta berkaitan dengan pengembangan prinsip *Miranda Rule* yang juga telah diadaptasi dalam KUHAP, seperti:

1. Melarang penyidik melakukan praktek pemaksaan yang kejam untuk memperoleh “pengakuan” *brutality to coerce confession*
2. Melarang Penyidik melakukan intimidasi kejiwaan *psychological intimidation*;

Berasamaan dengan larangan yang dimaksud, kepada tersangka diberikan hak untuk diperingatkan “hak konstitusionalnya” yang disebut dengan *Miranda Warning* antara lain :

1. Hak untuk tidak menjawab *a right to remain in silent*;
2. Hak didampingi Penasihat Hukum *a right to presence of an attorney*;

Namun khusus untuk pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, penyidik wajib memberitahukan hak terdakwa atau

tersangka untuk memperoleh bantuan hukum, hal ini berdasarkan Pasal 114

KUHAP menyatakan :

“dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP”

Setelah itu penyidik juga wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka atau terdakwa, menurut Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan :

“Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”

Pemeriksaan penyidikan kepada terdakwa atau tersangka yang tidak didampingi Penasihat Hukum telah melanggar ketentuan sesuai dengan kerangka atau unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 114 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka hasil pemeriksaan penyidikan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum acara (*undue process*).

Berdasarkan fakta hukum bahwa selama proses pemeriksaan terdakwa sesuai ketentuan yang termuat dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, yang pada kenyataannya dilapangan terdakwa atau

tersangka tidak mendapat penasihat hukum dari aparat penegak hukum. Seharusnya, Pengadilan wajib berupaya keras untuk memberitahukan terdakwa atau tersangka untuk bisa didampingi penasihat hukum. Ketika seorang terdakwa atau tersangka didampingi penasihat hukum dalam proses perkaranya, maka jalannya proses persidanganpun dapat berjalan dengan mudah. Ini dikarenakan selain terdakwa atau tersangka mendapat kemudahan dalam berproses terkait dengan pembelaan dan segala kemudahan lainnya dalam proses hukum, proses persidangan pun menjadi lebih jelas, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada dikarenakan telah terpenuhinya hak-hak terdakwa atau tersangka.

Jika Selama proses pemeriksaan terdakwa atau tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum maka Berita acara Penyidikan yang dibuat oleh penyidik melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana sebagai ketentuan yang bernilai HAM dan seketika itu juga BAP tersebut tidak dapat diterima atau tidak sah (*illegal*). Adapun dalam hal ini adalah tindakan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dengan alasan penyidikannya tidak sah (*illegal*) dikarenakan terdakwa tidak mendapatkan pendampingan penasihat hukum. Maka atas eksepsi ini penulis berpendapat Hakim dapat kembali mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa atau tersangka ketika adanya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP atau putusan

Mahkamah Agung terdahulu dan dapat memberikan putusan akhir dimana tuntutan dari jaksa penuntut umum tidak bisa dilanjutkan kembali dan terdakwa atau tersangka di putus bebas.

Jika dicermati Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang mengutamakan prinsip *Due Process of law* dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap tersangka/terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum. Dan sesungguhnya memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan *Accses to justice* bagi mereka yang terkena atau berurusan dengan masalah hukum. Serta diharapkan peran dari Negara melalui aparat penegak hukumnya dapat memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga masyarakat dari tindakan-tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum.

Berikut ini beberapa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan atau mendasari timbulnya kewajiban pemberian bantuan hukum serta pentingnya pelaksanaan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana yang bertujuan menciptakan keadilan ataupun keseimbangan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam putusan perkara Nomor 213 PK/Pid.Sus/2013 tentang peninjauan kembali putusan pengadilan terhadap kasus narkoba oleh tersangka TAN KIAN SIN Alias HENDRA :

- a. Dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yaitu Tersangka atau Terdakwa harus didampingi oleh Penasihat Hukum apabila tindak pidana yang didakwakan ancaman pidananya, pidana mati atau pidana 15 tahun dan bagi yang tidak mampu diancam tindak pidana 5 tahun ;
- b. Dalam hal Tersangka/Terdakwa tidak memiliki penasihat hukum maka pejabat yang berwenang harus menunjuk penasihat hukum untuk mereka. Apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka akibatnya dakwaan tidak dapat diterima (putusan MA No 1565 K/ Pid/1991, tgl 16 September 1991);
- c. Bantuan hukum dalam proses pidana merupakan salah satu hak yang dijamin dalam KUHAP. Pasal 54 KUHAP telah menegaskan bahwa Tersangka/ Terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, Namun ketentuan yang bersifat fakultatif ini telah dikritik sejak lama, karena tanpa seorang Advokatpun yang mendampingi Tersangka atau Terdakwa, maka pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan.
- d. Bantuan hukum dapat berubah menjadi wajib, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 KUHAP, sangkaan atau dakwaan terhadap Tersangka/Terdakwa diancam dengan hukuman mati dan/atau hukuman lima belas tahun atau lebih atau khusus bagi yang tidak mampu jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih dan ia tidak mempunyai penasihat hukum. Untuk itu, salah satu

penerapan *miranda rule* dalam KUHAP adalah yang diatur dalam Pasal 56 KUHAP ;

- e. Dalam proses ini tentunya, pejabat yang berwenang harus menunjuk Penasihat Hukum bagi kepentingan Tersangka/Terdakwa. Prinsip *Miranda rule* ini dapat ditemukan dalam Putusan MA No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 dan Putusan MA No. 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998;
- f. Maka dengan ini Pemohon PK menunjuk dari beberapa putusan Mahkamah Agung, yaitu :

Menurut MA dalam Putusan No 1565 K/Pid/1991 menyatakan bahwa :

"Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima";

- b. Menurut MA dalam putusannya No. 367 K/Pid/1998 menyatakan bahwa:

"Bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Agung di atas, ditemukan fakta bahwa Terdakwa diperiksa dalam tingkat penyidikan masing-masing pada tanggal 31 Desember 1996, tanggal 3 Januari 1997 dan tanggal 6 Januari 1997 dan dalam tingkat penuntutan tanggal 1 Maret 1997, tidak ditunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi, sehingga bertentangan dengan pasal 56 ayat (1)

KUHAP, sehingga Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut Umum batal demi hukum dan oleh karena itu penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang Pengadilan, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum" ;

- c. Apapun alasannya kehadiran Penasihat Hukum dalam proses pidana wajib sejak KUHAP diundangkan tahun 1981. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993 menjelaskan : "Penyidikan yang melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebabkan hasil penyidikan tidak sari sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima"; Asas praduga tidak bersalah dari awal pemeriksaan melekat pada diri Tersangka. Tersangka dinyatakan bersalah apabila putusan pengadilan telah berkekuatan hukum ;
- d. Bersalah tidaknya seorang Tersangka, pengadilan yang memutuskan. Meskipun pengadilan memutus perkara berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik. Akan tetapi, jika Berita Acara Pemeriksaan tersebut ternyata sesat, maka giliran berikutnya juga timbul peradilan sesat.
- e. Bahwa, mengingat Miranda Rule yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP bersifat imperatif, maka mengabaikan ketentuan ini mengakibatkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Tidak Dapat Diterima serta mengakibatkan "hasil penyidikan tidak sah atau ilegal". Hal

mana, pendirian dan penerapan yang seperti ini telah dikukuhkan dalam salah satu Putusan Peradilan Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan MARI Nomor : 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993, dalam kasus ini proses pemeriksaan penyidikan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP yaitu penyidikan berlanjut terhadap Tersangka tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

- f. Terdakwa yang tidak didampingi oleh Penasihat Hukum bisa dibebaskan dan dugaan penyiksaan merupakan beban pembuktian dari JPU, bukan Terdakwa.

Sejalan dengan hal di atas, penulis memiliki pendapat yang sama mengenai putusan tersebut karena sekalipun tidak terdapat ketentuan yang secara tegas memuat mengenai akibat hukum yang akan timbul sehubungan dengan tidak diterapkannya Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun seorang hakim wajib menggali nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat sebagaimana diatur pula dalam Pasal 16 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalik bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Ada beberapa metode yang dapat dilakukan dalam melakukan penemuan/penafsiran hukum. Dalam hal ini penulis berpendapat untuk

menggunakan metode penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.²³ Penafsiran ini digunakan untuk memperoleh hasil perbandingan antara pasal-pasal sebagai pertimbangan makna dari undang-undang lainnya tersebut.

Seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa salah satu tujuan pokok yang hendak dicapai atas penegakan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah agar terjaminnya proses peradilan yang adil (*fair*) dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Kewajiban pemberian bantuan hukum dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin akan dilakukan oleh aparat penegak hukum dikarenakan besarnya kekuasaan yang diberikan kepadanya.

Dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum jika tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum. Seperti disebut di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur sanksi atau akibat hukum jika tersangka atau terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum pada saat penyidikan khususnya di setiap tingkatan penyidikan. Padahal hak didampingi Penasihat Hukum itu adalah “WAJIB”, artinya tidak boleh tidak dan menjadi tanggung jawab dari Negara untuk memberikannya.

²³ Mahmud Marzuki, Peter, *opcit*, hlm. 11.

Pasal 114 Jo Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menegaskan bahwa kewajiban pemberian bantuan hukum itu wajib disediakan dengan cara menunjuk Penasihat Hukum oleh pejabat yang bersangkutan dalam di setiap tingkatan penyidikan. Lantas, apa konsekuensi hukum jika hal itu tidak dilakukan oleh pejabat yang berwenang ? Jawabannya, berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari penuntut umum adalah tidak sah sehingga batal demi hukum. Akibat hukum itu dapat diketahui dari beberapa putusan Mahkamah Agung (Yurisprudensi) yang menyatakan sebagai berikut:

1. **Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993** yang pokoknya menyatakan, :

“apabila syarat – syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”

2. **Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998** yang pada pokoknya menyatakan :

“bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”

3. **Putusan Mahkamah Agung NO 545 K/Pid.Sus/2011** menyatakan :

“Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula”

Berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993** , Penulis berpendapat bahwa mengenai akibat hukum yang timbul dengan diabaikannya Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu Jika Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan atas dasar hasil penyidikan yang *illegal* kemudian, dakwaan tersebut selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan pemeriksaan dalam pengadilan, maka dakwaan menjadi tidak sah atau *illegal* (tidak dapat diterima), sebagai konsekuensi hukum atas tidak dapat diterimanya tuntutan penuntut umum, maka terhadap tersangka atau terdakwa dapat diputus bebas karena adanya pelanggaran pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998** , Bahwa terlepas dari apapun yang menjadi dasar dari pertimbangan-pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan diatas, ditemukan fakta bahwa terdakwa atau tersangka yang diperiksa dalam semua tingkatan penyidikan, dimana pejabat yang berwenang tidak menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi tersangka atau

terdakwa, sehingga timbulah pelanggaran yang bertentangan dengan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam hal ini Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut Umum “batal demi hukum” dan oleh karena itu penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan telah sampai dalam sidang Pengadilan, dimana terdakwa atau tersangka sudah didampingi Penasihat Hukum.

Berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung NO 545 K/Pid.Sus/2011** , Bahwa sesuai dengan Pasal 143 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan apabila Berita Acara Pemeriksaan tidak memenuhi syarat materiil, dimana syarat materiil yaitu apabila tidak memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, maka Berita Acara Pemeriksaan akan cacat hukum, yang juga akan menjadikan Dakwaan Batal Demi Hukum, dimana dalam putusan Mahkamah Agung tersebut jika terdakwa atau tersangka tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan juga yang melakukan penyidikan bukanlah pejabat yang berwenang, maka dari itu Berita Acara Pemeriksaan tersebut batal demi hukum begitupu dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sesuai teori *nietigheid van rechtswege* berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhannya bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau

keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu.

Penulis memahami logika berpikir para hakim yang tertuang dalam Yurisprudensi di atas. Dasar atau landasan pemeriksaan di persidangan adalah surat dakwaan. Dakwaan berlandaskan pada berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian. BAP itu haruslah benar dan sah. Salah satu indikator benar dan sahnya berita acara pemeriksaan (BAP) adalah dipenuhinya hak-hak tersangka yaitu hak didampingi Penasihat Hukum pada saat diperiksa yang memang menjadikan hak atas bantuan hukum tersebut adalah “wajib”. Sehingga, jika hak tersebut tidak dipenuhi, maka tidaklah sah berita acara pemeriksaan (BAP) itu. Dan seterusnya dakwaan, tuntutan dan putusan yang dihasilkan atau didasarkan dari berita acara pemeriksaan (BAP) yang tidak sah menjadi tidak sah juga.

Pemecahan permasalahan ini tentunya dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan sesegera mungkin menetapkan mengenai sanksi bagi aparat penegak hukum apabila dengan sengaja tidak menyediakan penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana sehingga tersangka atau terdakwa tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh bantuan hukum padahal tersangka atau terdakwa telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana diatas 5 tahun atau tersangka atau

terdakwa yang tidak mampu berhak atas pemberian bantuan hukum yang mana ini menjadi kewajiban bagi negara untuk memberikannya.

Sedangkan Apabila sanksi atas pelanggaran dilakukan oleh advokat dimana berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka, yang kemudian sanksi tersebut tidak dapat dicantumkan dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka dapat digunakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2009 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma yang berisi ;

- (1) Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat.*
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:*
 - a. teguran lisan;*
 - b. teguran tertulis;*
 - c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau*
 - d. pemberhentian tetap dari profesinya.*

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul terkait dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dan memberikan sanksi terhadap para advokat yang lalai dalam menjalankan kewajibannya. Peraturan Pemerintah diatas dapat mengatasi permasalahan-permasalahan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh advokat tentang kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

Maka apabila ketentuan Pasal ini dilanggar, tujuan dari undang-undang dimana untuk melindungi tersangka atau terdakwa tidak bisa tercapai. Sehingga perlu adanya sanksi terhadap pelanggarnya yang kemudian akan menimbulkan suatu akibat hukum. Namun, patut disayangkan bahwa sampai saat ini belum ada aturan maupun putusan hakim yang secara tegas memberikan sanksi bagi aparat penegak hukum yang mengabaikan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Penulis, Konsep yang ditawarkan untuk permasalahan hukum terkait dengan kewajiban pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa dalam penyelesaian perkara pidana sesuai dengan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu ;

Bagi Hakim, Bahwa berlandaskan Yurisprudensi dan beberapa putusan-putusan Mahkamah Agung serta argumentasi yuridis dalam Pengadilan yang sudah di putus tersebut maka dari itu dapat menjadi suatu pertimbangan hukum atau rujukan bagi Majelis Hakim untuk dapat meletakkan perkara *a quo* yang mana melanggar hak-hak konstitusional para tersangka atau terdakwa secara lebih proporsional. Dalam hal demikian, hakim dituntut untuk menyelaraskan atau menafsirkan makna dari kewajiban yang terdapat dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, guna terciptanya kemanfaatan bagi tersangka atau terdakwa dan memenuhi

nilai-nilai keadilan serta keseimbangan hukum, khususnya bagi Terdakwa ataupun tersangka dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Bagi Tersangka, Apabila ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dilaksanakan oleh aparat pejabat yang berwenang dalam semua tahapan proses peradilan pidana, dalam hal ini tidak diberitahukannya hak-hak untuk tersangka atau terdakwa dalam memperoleh bantuan hukum, yaitu pendampingan oleh penasihat hukum dimana hal ini menjadi kewajiban dari aparat penegak hukum tersebut, maka terdakwa dapat mengungkapkan melalui Eksepsi, Pledoi, Banding, dan Kasasi. Pengajuan Upaya Hukum terkait pelanggaran Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut hanya dapat diajukan apabila terjadi pelanggaran Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditingkat penangkapan, penahanan dan persidangan, keputusan diterima atau tidaknya pengajuan tersebut tergantung kebijakan hakim. Selain upaya praperadilan, tersangka dapat pula mengadukan petugas polisi yang sewenang-wenang pada saat penangkapan dan penahanan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri karena telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang terutama diatur dalam Pasal 15 Perkapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagi Surat Dakwaan dan BAP, Hak atas bantuan hukum menjadi penting karena ini merupakan syarat penting agar proses pemeriksaan

Tersangka atau Terdakwa dimana terdapat perintah Undang-Undang agar Tersangka atau Terdakwa tersebut didampingi oleh Advokat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum telah diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan kedudukan Jaksa sebagai Penuntut Umum telah juga dipertegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai pihak yang paling berwenang untuk melakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7, Pasal 137, dan Pasal 140 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jika ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut diabaikan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana surat dakwaan harus dibatalkan.

Apabila penyidik tidak menyampaikan hak-hak tersangka termasuk hak mendapat bantuan hukum, maka menurut penulis bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik tersebut dapat dibatalkan demi hukum demikian juga dengan surat dakwaannya. Jadi tidak hanya pelanggaran pada Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja yang dapat membatalkan BAP yang dibuat oleh penyidik namun sudah seharusnya pelanggaran Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga dapat membatalkan BAP yang dibuat oleh penyidik. berdasarkan Pasal 143 ayat 3 Kitab Undang Hukum Acara Pidana juga disebutkan apabila BAP tidak memenuhi syarat materiil

maka BAP akan cacat hukum, yang juga akan menjadikan Dakwaan Batal Demi Hukum. Dimana dalam hal ini sudah sangat jelas termuat dalam ;

1. **Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998**
2. **Putusan Mahkamah Agung No 545 K/Pid.Sus/2011**

Bagi Pejabat yang Berwenang dan Advokat, jika pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik pada proses penyidikan terhadap tersangka dapat dikategorikan kedalam pelanggaran kode etik sesuai dengan Pasal 15 Perkapolri No.14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan untuk Advokat dapat dikenakan Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan advokat dalam menjalankan kewajibannya dimasukkan dalam kategori pelanggaran terhadap kode etik, dalam hal ini sanksi yang diterapkan adalah sanksi administratif. Berkenaan dengan hal ini, pada dasarnya penulis tidak sependapat karena pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap undang-undang yang dalam hal ini adalah pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam hal ini merupakan kewajiban dan bentuk tanggung jawab dari Negara untuk memenuhinya. Maka, seharusnya

penjatuhan sanksi kepada pejabat yang berwenang dan advokat dimana dalam hal ini dilakukan oleh negara dengan pemberian sanksi berupa sanksi pidana.

Dengan tidak ditunjuknya penasihat hukum oleh aparat penegak hukum terhadap terdakwa atau tersangka, penulis berpendapat maka penyidik telah melakukan pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam melakukan penyidikan terhadap terdakwa atau tersangka dalam semua tahapan penyidikan sampai dengan peradilan. Dengan demikian penyidik telah melakukan pelanggaran prinsipil, yakni pelanggaran terhadap hukum acara pidana dalam menegakan hukum, sehingga hasil BAP penyidik yang dijadikan dasar penyusunan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum adalah tidak berdasarkan hukum.

Sampai saat ini belum adanya sanksi pidana ataupun akibat hukum bagi aparat penegak hukum dan juga advokat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang dalam Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal inilah yang menjadi kendala dalam penegakan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena tanpa adanya sanksi ataupun akibat hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum dan advokat, maka kedepannya akan sulit untuk merealisasikan pemberian bantuan hukum yang bertujuan untuk perlindungan terhadap hak-hak tersangka sebagaimana dicita-citakan oleh undang-undang di negara kita.

Hal ini menjadikan tidak berjalannya keadilan bagi terdakwa atau tersangka dalam proses penyelesaian perkara pidana dimana dalam hal ini tidak adanya perlakuan yang sama bagi mereka dihadapan hukum ataupun didalam persidangan, sesuai dengan apa yang sudah menjadi asas dalam hukum Indonesia sendiri yaitu persamaan perlakuan *equal treatment* bagi semua orang, tanpa mengecualikan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa atau tersangka itu sendiri.

Pemerintah sendiri berkewajiban memberikan hak-hak terdakwa atau tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum serta penasihat hukumnya sendiri. Terdakwa atau Tersangka dapat memanfaatkan layanan Pos Bantuan Hukum (posbakum) yang disediakan oleh Pemerintah di dalam Pengadilan. Sehingga bisa terciptanya suatu proses peradilan yang berkeadilan sesuai dengan asas *equality before the law* dan asas-asas lainnya dalam hukum pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penulis menarik kesimpulan berdasarkan maksud dan tujuan penulisan skripsi (karya ilmiah) ini, yakni :

1. Pada dasarnya bila dilihat dari segi yuridis normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana secara jelas mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa yang terjerat kasus tindak pidana kejahatan, khususnya dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang hak terdakwa atau tersangka untuk memperoleh bantuan hukum. Proses pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa atau tersangka yang diancam pidana 5 tahun atau lebih sejauh ini belum bisa berjalan dengan baik. Padahal Pemerintah berkewajiban memberitahukan hak-hak mereka melalui Sistem informasi secara langsung, serta melalui situs website dalam Pengadilan Negeri guna memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan dapat memperoleh informasi yang jelas ataupun menginformasikan secara langsung terhadap terdakwa atau tersangka pada semua tahapan pemeriksaan, penyidikan, peradilan terkait dengan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa secara cuma-cuma. Untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai penerapan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait proses

pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa atau tersangka yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, Pemerintah melalui pengadilan menyediakan bantuan hukum sampai terdakwa atau tersangka menerima bantuan hukum.

Berikut ini adalah tahapan proses tersebut :

- a. Terdakwa mengajukan permohonan bantuan hukum
- b. Majelis hakim pengadilan memeriksa berkas
- c. Majelis hakim menetapkan dan menunjuk advokat
- d. Terdakwa menerima bantuan hukum

Dalam pelaksanaannya pasal 56 ayat (1) adalah pejabat yang berwenang pada semua tahapan penyidikan, pemeriksaan, peradilan dan para advokat harus berperan aktif. Ini dibuktikan dengan adanya makna kata “wajib” bagi aparat penegak hukum untuk menunjuk pensihat hukum serta informasi kepada pihak terdakwa atau tersangka terkait dengan pemberian bantuan hukum. Pihak terdakwa atau tersangka berhak untuk mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan untuk menerima bantuan hukum. Dengan adanya makna kata “wajib” dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka segala bentuk hak yang diberikan oleh aparat penegak hukum bagi terdakwa atau tersangka menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah untuk memenuhinya, jika sudah berjalan dengan baik penerapan ketentuan tersebut maka, dapat terwujudlah proses peradilan yang adil, seimbang dan memberikan manfaat bagi terdakwa atau tersangka.

2. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyidik atau aparat penegak hukum mempunyai “kewajiban” untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa atau tersangka khususnya hak dalam mendapat bantuan hukum. Namun dari makna “wajib” tersebut tidak diatur sebuah konsekuensi yuridis ataupun sanksi bagi penyidik atau aparat penegak hukum apabila ketentuan “wajib” tersebut tidak dilaksanakan. Sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka dimaksudkan untuk sarana kontrol terhadap tindakan penyidik yang seringkali bersikap sewenang-wenang terhadap tersangka pada saat penyidikan, asas praduga tak bersalah dalam tahap penyidikanpun seringkali diabaikan. Karena bantuan hukum merupakan Hak Asasi Manusia maka pelanggaran terhadap pemberian bantuan hukum dapat juga dikategorikan kedalam pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Akibat Hukum yang timbul dari tidak dipenuhinya hak-hak terdakwa atau tersangka terdapat timbulnya beberapa putusan Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa apabila terjadi pelanggaran ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait bantuan hukum maka BAP yang dibuat oleh penyidik dinyatakan tidak sah (*Illegal*), tidak dapat diterima ataupun batal demi hukum dan tuntutan yang dibuat oleh penuntut umum dianggap tidak pernah ada. Putusan Mahkamah Agung tersebut tercantum dalam ;

- a. **Putusan Mahkamah Agung RI No 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993,**
- b. **Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998,**
- c. **Putusan Mahkamah Agung NO 545 K/Pid.Sus/2011.**

Putusan Mahkamah Agung sering dijadikan yurisprudensi ataupun pertimbangan hakim, namun karena Indonesia tidak menganut asas *Precedent* maka hakim tidak wajib melaksanakan yurisprudensi dalam perkara serupa hal ini menjadikan tidak berjalannya keadilan bagi terdakwa dalam proses penyelesaian perkara pidana dimana dalam hal ini tidak adanya persamaan bagi mereka dihadapan hukum ataupun didalam persidangan. Maka dalam hal ini perlu adanya suatu ketentuan yang mengatur mengenai sanksi bagi penyidik atau advokat yang lalai menjalankan kewajibannya agar ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dipenuhi dan dipahami oleh tersangka/terdakwa serta bertujuan menciptakan keadilan, keseimbangan dan kemanfaatan.

B. Saran

1. Untuk menjamin sebuah kepastian hukum, diharapkan pemerintah segera membuat atau memberikan sanksi peraturan terkait pemberian bantuan hukum ini. Sesuai ketentuan yang termuat dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dituliskan antara lain bahwa penunjukan penasihat hukum diwajibkan terkait perkara pidana

kepada terdakwa atau tersangka baik yang tidak mampu dan diancam dengan pidana lima tahun ke atas dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Dalam pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait tidak dijelaskan mengenai konsekuensi hukum apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan. Tidak ada sanksi tegas kepada pejabat hukum apabila ia tidak melakukan kewajibannya sesuai pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Diharapkan pemerintah segera membenahi peraturan terkait, agar kepastian dan keadilan hukum menjadi lebih terjamin.

2. Hakim, sebaiknya mempertimbangkan upaya hukum yang ditempuh oleh terdakwa terkait pelanggaran pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. tidak hanya pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tahap penangkapan, penahanan dan penghentian penuntut umum, namun juga pelanggaran pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada semua tahapan pemeriksaan. Pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik juga sepatutnya dapat dijadikan dasar seorang terdakwa atau tersangka untuk melakukan upaya hukum karena ketentuan Pasal 114 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangat berkaitan erat dengan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam, 2008, **Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana**, Jakarta, Restu Agung.

Adnan Buyung Nasution, 2007, **Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan (Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara)**, Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum

Andi Hamzah, 1984, **Pengantar Hukum Acara Indonesia**, Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____ 2000, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika.Cet.II.

_____ 2001, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.II.

_____ 2004, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, edisi revisi. Jakarta, Sinar Grafika.

Asfinawati. 2007. **Prolog: Bantuan Hukum Cuma-Cuma dan Komersialisasi, dalam Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Bantuan Hukum Akses Masyarakat Miskin dan Marjinal terhadap Keadilan**, Jakarta: LBH Jakarta.

- _____ 2010, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta Sinar Grafika
- Asshiddiqie, Jimly. **Gagasan Negara Hukum Indonesia**, (Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Ketua Asosiasi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Indonesia)
- Atmasasmita, Ramli. 1996. **Perbandingan Hukum Pidana**. Bandung, Fikahati Aneska
- Barda, Nawawi Arif. 2011. **Perbandingan Hukum Pidana (Edisi Revisi)**. Jakarta.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, **Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia**, Bandung, Mandar Maju
- _____ 1994, **Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia**, Bandung, Binacipta
- Binzia Kadabi, et al, 2001, **Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia**, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation.
- Chrisbiantoro, M Nur Sholikin, Satrio Wirataru, 2014, **Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi Terkait Pelaksanaan Undang Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum**, Jakarta,
- KontraS Djoko Prakoso, 1985, **Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP**, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Forum Akses Keadilan untuk Semua (FOKUS). 2012. **Bantuan Hukum Untuk Semua**, Jakarta: Open Society Justice Initiative

Frans Hendra Winarta, 2000, **Bantuan Hukum Suatu hak asasi Manusia Bukan**

Belas Kasihan, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo

_____, 2009, **Pro Bono Publico Hak Konstitusional Fakir Miskin**

Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama.

Ishaq, 2010, **Pendidikan Keadvokatan**, Jakarta Sinar Grafiik

Lilik Mulyadi, 2012, **Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus**

Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan, Bandung,
PT. Citra Aditya Bakti

Luhut Pangaribuan, 2002, **Advokat dan Contempt of Court**, Jakarta Penerbit
Djambatan

Mahmud Marzuki, Peter, 2005, **Penelitian hukum**, Jakarta, Kencana

Mardjono Reksodiputro, 1997, **Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana**, Jakarta,
Lembaga Kriminologi UI

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, **Hukum Acara Pidana dalam
teori dan praktek**. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja, 1975, **Bantuan Hukum di Indonesia Terutama dalam
Hubungannya dengan Pendidikan Hukum**, Bandung, CV. Binacipta

Muladi, 1995, **Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana**, Semarang, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro

M. Sofyan Lubis, 2010, **Prinsip Miranda Rule, Hak Tersangka Sebelum
Pemeriksaan**, Yogyakarta, Pustaka Yustitia

M Yahya Harahap, 2002, **Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP**, Jakarta, Sinar Grafika

_____ 2010, **Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan**; Edisi ke dua. Jakarta: Sinar Grafika.

Nasution, Adnan Buyung, dkk. 2007. **Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan**, Jakarta: LBH Jakarta

_____ 1988. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES

O.C. Kaligis, 2006, **Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana**, Bandung: PT Alumni.

Romli Atmasasmita, 1996, **Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme**, Jakarta, Penerbit Bina Cipta

Satjipto Rahardjo, 2009, **Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia**, Yogyakarta: Genta Publishing, Cetakan I

Situmorang, Mosgan. 2011. **Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat**, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

Sudewo, Fajar Ari, 2010, **Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana**. Bandung: Mandar Maju

Soerjono Soekanto, 1983, **Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis**,

Jakarta, Ghalia Indonesia

_____ 1988, **Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi**, Bandung,

Remedja Karya

Sunggono, Bambang dan Aries Harianto. 2009. **Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia**. Bandung: Mandar Maju

Winata, Frans Hendra. 2009. **Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum**. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

_____ 2000. **Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia**

Bukan Belas Kasihan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Yudha Pandu, 2004, **Klien & Advokat Dalam Praktek**, Jakarta, PT. Abadi

Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2012, **Penafsiran dan Konstruksi Hukum**, Bandung, PT.Alumni

Yesmil Anwar dan Adang, 2009, **Sistem Peradilan Pidana**. Bandung Widja Padjajaran.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Lampiran 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Internet

[http://www.tanyahukum.com/uncategorized/179/jenis-bantuan-](http://www.tanyahukum.com/uncategorized/179/jenis-bantuan-hukumdiindonesia/)

[hukumdiindonesia/](http://www.tanyahukum.com/uncategorized/179/jenis-bantuan-hukumdiindonesia/) Diakses pada 23 november 2017 pukul 21.25 WIB

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a1c8c3320c1/progresivitas-dalam-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a1c8c3320c1/progresivitas-dalam-putusan-pengadilan)

[putusan-pengadilan](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54a1c8c3320c1/progresivitas-dalam-putusan-pengadilan) diakses 8 mei 2018 pukul 11.58 WIB

